

HASIL KAJIAN GENDER dari Basis Data Terpadu



Januari 2013



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



HASIL KAJIAN GENDER ***dari Basis Data Terpadu***

Anne Lockley, Julia Tobias, and Adama Bah¹

¹Anne Lockley (annelockley@me.com); Julia Tobias (julia.tobias@tnp2k.go.id);
Adama Bah (adama.bah@tnp2k.go.id).

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Real Rahadinnal, Nathaniel Smith, dan Laura Wijaya atas bantuannya dalam analisa data; Indunil De Silva, Fiona Howell, dan Sudarno Sumarto untuk masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam makalah ini; dan AusAID yang telah mendanai penelitian ini. Penelitian ini didanai oleh Poverty Reduction Support Facility (PRSF), yang dikelola oleh GRM Internasional, atas nama AusAID. Seluruh opini dan kesimpulan dalam laporan ini bersumber dari tim peneliti dan bukan merupakan refleksi pendapat Pemerintah Indonesia, AusAID maupun GRM International.

Poin-Poin Utama untuk Pembuat Kebijakan

Analisa ini didasarkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang dikumpulkan sebagai bagian dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2011 dan dikonsolidasikan ke dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (BDT). Analisa ini mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kebijakan perlindungan sosial yang dirangkum seperti di bawah ini.

- Terdapat hampir 3 juta rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan (RTP) yang berada di 3 desil terendah dalam Basis Data Terpadu (BDT). Totalnya, jumlah ini mewakili 15% dari 3 desil terendah di populasi dalam BDT yang terdiri dari 10% di desil terendah, 15% rumah tangga di desil kedua, dan 21% di desil ketiga. Jika dibandingkan, RTP mencakup 14% dari semua rumah tangga berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia. Mungkin saja bahwa persentase RTP ini mungkin lebih rendah dari yang seharusnya karena alasan-alasan yang terkait kesepakatan mengenai definisi kepala rumah tangga perempuan.
- Kepala RTP rata-rata lebih tua daripada kepala rumah tangga laki – laki (RTL). Di antara hampir tiga juta RTP di tiga desil terendah, usia rata-rata kepala adalah 55 dibandingkan dengan usia rata-rata 46 untuk laki-laki kepala rumah tangga. Hanya 7% dari semua laki-laki kepala rumah tangga yang berada di usia lebih dari 60 tahun sedangkan 24% perempuan rumah tangga berada di kelompok usia lanjut ini
- Dengan demikian, RTP memiliki profil status pernikahan yang berbeda. Sebagian besar RTP yang berada di desil terendah adalah janda yang ditinggal mati (75%), 14% bercerai, 10% menikah, dan 2% lajang. Sebaliknya, hampir semua laki-laki kepala rumah tangga berstatus menikah (96%).
- Secara keseluruhan, Indonesia memiliki rasio laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang di tiga desil terendah dan di populasi umum. Meskipun demikian, di beberapa provinsi, terutama Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan atau tidak biasa pada jumlah laki-laki terhadap perempuan. Penelitian dan perencanaan tingkat daerah dibutuhkan untuk memperoleh alasan mengapa terjadi ketidakseimbangan, terutama pada kelompok usia subur dan usia produktif. Selain itu, kita juga perlu mendorong adanya respon kebijakan yang sesuai.
- Kepala RTL cenderung memiliki anggota rumah tangga yang lebih banyak dibandingkan dengan RTP dengan jumlah rumah tangga rata-rata empat dan lima anggota, secara berurutan, di tiga desil terbawah. Lebih jauh lagi, hampir sepertiga RTP merupakan rumah tangga dengan satu orang saja sementara pada RTL, kondisi ini hanya ditemukan pada 1% rumah tangga.
- Salah satu ketidaksetaraan gender yang paling mengejutkan dalam data BDT adalah bahwa 21% kepala RTP di tiga desil terendah tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM). Angka yang sama untuk kepala RTL hanya 12%. Angka yang sama untuk kepemilikan KTP ditemukan untuk laki-laki dan perempuan secara umum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program untuk meningkatkan kepemilikan KTP harus secara spesifik menarget RTP dan perempuan pada umumnya.
- Angka disabilitas untuk kepala RTP di tiga desil terendah sama dengan angka kepala RTP di tingkat sosio-ekonomi rata-rata. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kepala RTL, tercatat bahwa angka prevalensi disabilitas dan penyakit kronis lebih tinggi pada kepala RTP. Kemungkinan hal ini disebabkan karena profil usia mereka yang lebih tua.
- Tampaknya pada umumnya seorang perempuan yang sudah menikah dikenali sebagai kepala rumah tangga adalah ketika pasangannya menderita penyakit kronis atau memiliki disabilitas. Angka disabilitas (10%) dan penyakit kronis (11%) tinggi terutama pada pasangan kepala RTP di tiga desil terendah. Angka disabilitas dan penyakit kronis yang lebih tinggi pada RTP ini kemungkinan mengakibatkan kerentanan dan kebutuhan sumber daya untuk rumah tangga-rumah tangga ini.
- Kesenjangan gender lain yang mengejutkan dan teridentifikasi dalam data BDT adalah bahwa kepala RTP dari tiga desil terendah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi dibandingkan dengan kepala RTL. Hanya 52% dari kepala

RTP telah menyelesaikan pendidikan setidaknya pendidikan dasar dibandingkan dengan kepala RTL dengan persentase 74%. Kesenjangan gender berlanjut di tingkat penyelesaian pendidikan di tingkat SMP dan SMA. Implikasi dari kondisi ini adalah memiliki implikasi khusus untuk strategi-strategi sosialisasi program dan menunjukkan kebutuhan akan informasi dalam bentuk tidak tertulis ketika menarget kelompok ini. Terdapat sedikit perbedaan dalam tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh laki-laki dan perempuan dalam tiga desil terendah ini.

- Persentase kepala RTL (93%) di desil satu sampai tiga yang melaporkan bahwa mereka bekerja, lebih besar jika dibandingkan dengan kepala RTP (62%). Perbedaan gender yang sama ditemui di semua kelompok usia antara laki-laki dan perempuan. Angka 62% untuk kepala RTP yang bekerja adalah sekitar 7% lebih tinggi daripada angka untuk pasangan dari kepala RTL di desil-desil terendah. Hampir 60% pasangan kepala RTP bekerja dan angka ini mendekati angka kepala RTP dan jauh dibawah angka untuk kepala RTL.
- Di semua kelompok umur, kecuali yang termuda (0-14 tahun), perempuan dan laki-laki di tiga desil terendah melaporkan jam kerja yang lebih sedikit dibandingkan populasi umum. Di setiap kelompok umur, laki-laki bekerja dengan jumlah jam lebih panjang per minggu dibandingkan perempuan, dengan rata-rata tujuh jam lebih lama per minggu. Pada 21% kepala RTP, tidak terdapat jam kerja oleh anggota rumah tangga lainnya dan ini sangat kontras dengan hanya 1% pada kepala RTL. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa PPLS dan Susenas tidak secara spesifik memasukkan jam kerja dibayar atau tidak dibayar di dalam rumah seperti untuk mengurus keluarga dan mengasuh anak. Di Indonesia, seperti juga halnya di tempat lain di dunia, peran ini secara dominan dilakukan oleh anggota RTP.
- PPLS 2011 mengumpulkan data terkait apakah rumah tangga menerima suatu rangkaian program perlindungan sosial atau tidak. Data ini secara proporsional memperlihatkan bahwa lebih banyak RTP menerima Beras untuk Rumah Tangga Miskin(Raskin) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Lebih sedikit perempuan kepala rumah tangga, secara proporsional, menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan jauh lebih sedikit dari mereka yang mengakses program Keluarga Berencana (KB) sejalan dengan dugaan sebelumnya karena program ini menarget perempuan di usia subur sementara kepala RTP biasanya berusia lebih tua.
- Hanya ada perbedaan sangat kecil dalam hal sambungan listrik dan air antara RTP dan RTL. RTP memiliki angka relatif lebih tinggi dalam hal sambungan PLN dan akses air minum dari sumber yang aman.

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	i
Poin-Poin Utama untuk Pembuat Kebijakan	ii
Daftar Singkatan	vii
1. Pendahuluan	1
2. Metodologi	1
3. Hasil	3
3.1. Jumlah RTP dan RTL	3
3.2. Usia dan status pernikahan kepala RTP dan RTL	4
3.3. Jumlah dan usia laki-laki dan perempuan di rumah tangga miskin	5
3.4. Ukuran rumah tangga dan ketergantungan	6
3.5. Kepemilikan kartu tanda penduduk	8
3.6. Disabilitas dan penyakit kronis	9
3.7. Pendidikan	11
3.8. Pekerjaan	13
3.9. Akses terhadap program perlindungan sosial	16
3.10. Akses terhadap air dan listrik	16
4. Isu-Isu Utama dan Rekomendasi	17
5. Kesimpulan	20
6. Daftar Pustaka	21
Lampiran 1. Tabel Data Tambahan.....	22

Daftar tabel dan gambar

Tabel 1	Jumlah dan persentase RTP dan RTL di desil 1-3 (BDT) dan populasi (Sensus Penduduk 2010)	3
Gambar 1	Distribusi (persentase) rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki dan perempuan di kelompok usia, desil 1-3 (BDT)	4
Tabel 2	Jumlah rumah tangga berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin kepala rumah tangga, desil 1-3 (BDT)	4
Gambar 2	Status pernikahan berdasarkan kelompok usia kepala RTP dan RTL di desil 1-3 (BDT) dan populasi (Sensus penduduk 2010)	5
Tabel 3	Jumlah dan persentase laki-laki dan perempuan di desil 1-3 (BDT) dan total populasi (Sensus Penduduk 2010)	6
Gambar 3	Rasio jenis kelamin spesifik usia di desil 1-3 (BDT) dan populasi (Sensus penduduk 2010)	6
Gambar 4	Ukuran RTP dan RTL di desil 1-3 (BDT)	7
Tabel 4	Ukuran rumah tangga berdasarkan desil dan jenis kelamin kepala rumah tangga di desil 1-3 (BDT)	7
Tabel 5	Rasio ketergantungan untuk RTP dan RTL di desil 1-3 (BDT)	8
Tabel 6	Kepemilikan kartu identifikasi oleh kepala RTP dan RTL dan individu berusia di atas 20 tahun di desil 1-3 (BDT)	8
Gambar 5	Kepemilikan kartu identitas kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki dan perempuan dan laki-laki berusia lebih dari 20 tahun, desil 1-3 (BDT)	9
Tabel 7	Prevalensi disabilitas dan penyakit kronis RTP dan RTL, desil 1-3 (BDT)	9
Gambar 6	Persentase disabilitas dan penyakit kronis yang dilaporkan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok usia, desil 1-3 (BDT)	10

Gambar 7	Sebaran jenis disabilitas pada laki-laki dan perempuan, desil 1-3 (BDT)	11
Gambar 8	Sebaran jenis penyakit kronis pada kepala rumah tangga, laki-laki dan perempuan, desil 1-3 (BDT)	11
Tabel 8	Tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan pada RTP dan RTL berdasarkan desil, (BDT) dan di populasi (Susenas 2010)	12
Tabel 9	Tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh perempuan dan laki-laki di desil 1-3 (BDT), dan di populasi (Susenas 2010)	12
Gambar 9	Persentase perempuan dan laki-laki bekerja berdasarkan kelompok usia, desil 1-3 (BDT) dan populasi (Susenas 2010)	13
Gambar 10	Siapa yang bekerja dengan jumlah jam lebih lama di RTP dan RTL, desil 1-3 (BDT)	14
Gambar 11	Jam kerja rata-rata individu yang bekerja berdasarkan usia dan jenis kelamin, desil 1-3 (BDT)	15
Gambar 12	Sebaran sektor pekerjaan yang paling sering ditemui untuk laki-laki dan perempuan bekerja, desil 1-3 (BDT)	15
Tabel 10	Penerimaan program perlindungan sosial yang dilaporkan berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga, desil 1-3 (BDT)	16
Tabel 11	Sumber listrik dan air untuk RTP dan RTL, desil 1-3 (BDT)	16

Daftar Singkatan

BDT	<i>Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial</i>
BSM	<i>Beasiswa untuk Siswa Miskin</i>
BPS	<i>Badan Pusat Statistik</i>
Jamkesmas	<i>Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>
Jamsostek	<i>Jaminan Sosial Tenaga Kerja</i>
KB	<i>Keluarga Berencana</i>
PKH	<i>Program Keluarga Harapan</i>
PLN	<i>Perusahaan Listrik Negara</i>
PPLS	<i>Pendataan Program Perlindungan Sosial</i>
Raskin	<i>Beras untuk rumah tangga miskin</i>
RTL	<i>Rumah tangga dengan kepala rumah tanggalaki-laki</i>
RTP	<i>Rumah tangga dengan kepala rumah tanggaperempuan</i>
SIM	<i>Surat Izin Mengemudi</i>
Susenas	<i>Survei Sosial Ekonomi Nasional</i>
TNP2K	<i>Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</i>

1. Pendahuluan

Analisa ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman terhadap perbedaan gender dalam karakteristik rumah tangga miskin, dan faktor-faktor khusus yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan kesetaraan gender dalam hal akses terhadap inisiatif perlindungan sosial. Analisa ini bisa dilakukan karena adanya kumpulan data terpisah berdasarkan jenis kelamin dan tingkat intra-rumah tangga yang diperoleh sebagai bagian dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) di tahun 2011 dan konsolidasi data ini dalam Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial.

BDT merupakan suatu sistem untuk mengidentifikasi penerima manfaat potensial dari program perlindungan sosial yang diimplementasikan sebagai bagian dari upaya penurunan kemiskinan di Indonesia. Basis data ini mencakup rincian informasi sosio-ekonomi dan demografik (termasuk nama dan alamat) untuk 40% populasi termiskin yang mencakup kelompok-kelompok target dari sebagian besar program perlindungan sosial di Indonesia. Basis Data Terpadu saat ini digunakan untuk memilih penerima manfaat bagi program penurunan kemiskinan dan perlindungan sosial pemerintah termasuk:

- Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang memberikan akses gratis terhadap layanan kesehatan kepada rumah tangga-rumah tangga di 30% termiskin di populasi yang telah diidentifikasi dalam basis data;
- Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan uang tunai kepada rumah tangga yang sangat miskin dan memiliki ibu hamil, bayi/balita, dan/atau anak usia sekolah. Pemberian uang hanya diberikan dengan syarat kehadiran di sekolah dan penggunaan layanan kesehatan ibu dan anak;
- Beasiswa pemerintah untuk membantu menutupi biaya sekolah anak miskin usia sekolah Beasiswa untuk Siswa Miskin (BSM);
- Beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin atau Beras untuk rumah tangga miskin (Raskin); dan
- Sejumlah program pembangunan pemerintah daerah.

Analisa berikut ini memberikan gambaran sekilas terhadap situasi saat ini sehingga memberikan sejumlah informasi dasar untuk pemantauan komposisi rumah tangga miskin di masa depan yang terlebih dahulu dipilah berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga dan, jika memungkinkan, anggota rumah tangga lainnya. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan sensitivitas terhadap gender dalam merancang kegiatan dan merumuskan kebijakan. Sejumlah area untuk analisa lebih lanjut juga diidentifikasi.

2. Metodologi

PPLS dilakukan antara bulan Juli dan Oktober 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sekitar 25,2 juta rumah tangga Indonesia disurvei di seluruh negeri di setiap desa di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 80.000 untuk menangkap 40% termiskin dari populasi.² Data PPLS merupakan sumber data utama untuk Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dengan memandang tujuan penggunaan data, strategi pengambilan sampel untuk PPLS dirancang untuk menarget rumah tangga yang mungkin termasuk golongan miskin dan hampir miskin.³ Metodologi *proxy-means testing* (PMT) digunakan untuk mengklasifikasi rumah tangga di BDT

² Keterangan lebih rinci mengenai proses PPLS dan proses penargetan tersedia di TNP2K (www.tnp2k.go.id).

³ Proses ini diuntungkan oleh ketersediaan data sosio-ekonomi rumah tangga dari sensus 2010 yang digunakan untuk membuat pra-daftar rumah tangga termiskin. Rumah tangga-rumah tangga ini kemudian disurvei dengan kuesioner PPLS untuk mengumpulkan data sosio-ekonomi yang lebih mutakhir dan rinci. PPLS juga mencakup rumah tangga tambahan yang diidentifikasi sebagai rumah tangga miskin berdasarkan sumber-sumber informasi lain termasuk putaran PPLS terdahulu di tahun 2008 dan pengetahuan masyarakat mengenai rumah tangga paling miskin.

berdasarkan prediksi tingkat kesejahteraannya. PMT mengestimasi tingkat kesejahteraan (konsumsi) berdasarkan berbagai dimensi kemiskinan termasuk pendidikan, demografi rumah tangga, pekerjaan, karakteristik rumah, dan kepemilikan aset. Berdasarkan indeks kesejahteraan PMT, rumah tangga-rumah tangga dalam BDT telah dikategorisasikan berdasarkan desil dalam distribusi konsumsi. Laporan ini berfokus pada 30% populasi termiskin (desil satu hingga tiga) yang mencakup rumah tangga miskin serta yang dikategorikan sebagai hampir miskin.

Melalui PPLS, serangkaian data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dikumpulkan. Karena fokus program penurunan kemiskinan seringkali berada di unit rumah tangga, rumah tangga menjadi unit kunci dalam analisa dengan variabel pemilah yang mencakup jenis kelamin kepala rumah tangga. Hingga batas tertentu, situasi dan pengalaman RTP memberikan indikator proksi untuk situasi dan pengalaman perempuan secara lebih luas. Misalnya, kita dapat mengasumsikan bahwa jika informasi dan layanan dapat diakses oleh RTP, maka informasi dan layanan tersebut juga dapat diakses oleh perempuan dalam RTL. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa akan terdapat sejumlah faktor yang unik untuk RTP ketika menginterpretasi data apapun. Lebih jauh lagi, informasi deskriptif dan komparatif yang berguna dapat ditarik dari analisa di tingkat individu. Oleh karena itu, untuk analisa ini, statistik deskriptif diperoleh dari Basis Data Terpadu untuk kisaran variabel-variabel yang dipilah untuk membandingkan RTP dan RTL serta kepala rumah tangga, dan, jika memungkinkan, antara semua individu perempuan dan laki-laki.

Fokus utama analisa data ini adalah tiga desil terendah pada Basis Data Terpadu. Meskipun demikian, untuk mengeksplorasi hingga batas mana perbedaan gender di antara rakyat miskin ini konsisten atau berbeda dari kecenderungan di populasi seluruhnya (semua desil) terdapat sejumlah perbandingan dengan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010 dan Survei Sosio-Ekonomi Nasional (Susenas) 2010.⁴

Beberapa usulan ditawarkan sebagai langkah selanjutnya untuk penelitian di masa depan yang dapat dibangun berdasarkan hasil kerja ini. Pertama, akan sangat membantu jika data deskriptif ini dilengkapi dengan analisa kuantitatif yang lebih kuat dan ditujukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel terkait gender dan penurunan kemiskinan. Metode penelitian kualitatif juga akan dapat memberikan sejumlah pandangan mendalam ke sejumlah dinamika sosio-budaya yang relevan terhadap gender dan kemiskinan yang dapat melengkapi analisa kuantitatif yang digunakan dalam makalah ini sehingga akan lebih bermanfaat. Selain itu, jenis analisa ini dapat dieksplorasi hingga lebih mendalam di tingkat provinsi atau kota/kabupaten karena terdapat kemungkinan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan bermakna dalam situasi terkait gender di daerah-daerah di Indonesia. Selain itu, salah satu keterbatasan penelitian ini adalah bahwa pada saat penulisan, sejumlah data tidak tersedia untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

⁴ Penting sekali untuk memahami bagaimana PPLS berbeda dari sumber data sosio-ekonomi lain seperti Susenas yang digunakan untuk mengestimasi angka resmi rumah tangga miskin setiap triwulan. Susenas dirancang untuk bersifat representatif secara statistik untuk populasi Indonesia secara keseluruhan sementara PPLS hanya mencakup desil termiskin. Susenas mencakup sampel yang jauh lebih kecil (sekitar 300.000 rumah tangga per tahun) dibandingkan dengan PPLS. Susenas mengumpulkan konsumsi rumah tangga secara rinci (yang pada umumnya dianggap sebagai ukuran ideal dan akurat untuk kemiskinan) sementara skala PPLS yang lebih besar mengharuskan pengumpulan indikator yang lebih sederhana yang digunakan sebagai proksi untuk konsumsi. Kita harus berhati-hati agar tidak mengasumsikan bahwa karakteristik rumah tangga di desil termiskin dalam PPLS identik dengan yang terdapat di desil termiskin yang didasarkan pada konsumsi meskipun analisa awal dari kedua set data ini telah menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi. Selain itu patut dicatat bahwa dengan adanya fitur-fitur khusus dalam pengambilan sampel PPLS dan strategi analisisnya, kehandalan data bergantung pada suatu batas tertentu dari kualitas enumerasi dan rumus PMT yang digunakan, yang mungkin bervariasi hingga batas tertentu di lokasi berbeda. Mungkin juga bahwa sejumlah perbedaan gender yang terobservasi merupakan produk sampingan dari proses PMT itu sendiri. Isu ini akan dieksplorasi lebih lanjut di penelitian lebih lanjut. Sejumlah variabel yang masuk ke dalam persamaan PMT sebagai prediktor kemiskinan relevan dengan gender, termasuk jenis kelamin dan status pernikahan kepala rumah tangga.

3. Hasil

3.1. Jumlah RTP dan RTL

Terdapat hampir tiga juta RTP di tiga desil Basis Data Terpadu, termasuk lebih dari 600,00 di desil satu, 900,000 in desil dua, dan 1,3 jutadesil tiga (Tabel 1). Totalnya, rumah tangga tersebut mewakili 15% dari tiga desil terendah pada populasi di Basis Data Terpadu. Jika dibandingkan, RTP mencakup 14% dari semua rumah tangga sesuai dengan Sensus Penduduk Indonesia .

Mungkin yang mengejutkan, berdasarkan proses PMT yang digunakan untuk mengklasifikasi status kesejahteraan rumah tangga di Basis Data Terpadu, RTP kelihatannya lebih kecil kemungkinannya untuk miskin sepenuhnya meskipun mereka lebih mungkin berada di kategori hampir miskin. Secara khusus, kepala rumah tangga perempuan mencakup hanya 10% rumah tangga di desil terendah. Pada desil terendah kedua, pada 15% rumah tangga, RTP hanya sedikit di atas angka nasional. Di desil terendah ketiga, rumah tangga ini mencakup proporsi yang jauh lebih besar (21%) dibandingkan dengan angka nasional.

Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya penelitian selanjutnya mengenai ketidaksetaraan gender untuk tidak hanya berfokus pada rumah tangga miskin saja tetapi juga mencakup rumah tangga hampir miskin di atas garis kemiskinan. Desil ketiga ini juga berada di posisi rentan dan dapat memperoleh keuntungan dari perlindungan jaring pengaman sosial. Telah diestimasi misalnya bahwa rumah tangga 40% termiskin di Indonesia tahun ini memiliki kesempatan 10% untuk jatuh ke dalam kemiskinan tahun depan [1]. Akan bermanfaat juga jika di penelitian selanjutnya kita menganalisa bagaimana metode-metode berbeda untuk menentukan dan mengukur kemiskinan dapat mempengaruhi perbedaan-perbedaan gender yang teramati di kalangan miskin.⁵

Tabel 1 Jumlah dan persentase RTP dan RTL di desil1-3 (BDT) dan populasi (Sensus Penduduk 2010)

Sumber data	Desil	Jumlah Rumah Tangga			Persentase Rumah Tangga dalam Desil		
		RTL	RTP	Total	RTL	RTP	Total
BDT	Desil 1	5.612.658	600.120	6.212.778	90%	10%	100%
	Desil 2	5.225.527	939.460	6.164.987	85%	15%	100%
	Desil 3	4.839.972	1.324.784	6.164.756	79%	21%	100%
	Total desil 1-3	15.678.157	2.864.364	18.542.521	85%	15%	100%
SP 2010	Total populasi	52.619.192	8.538.400	61.157.592	86%	14%	100%

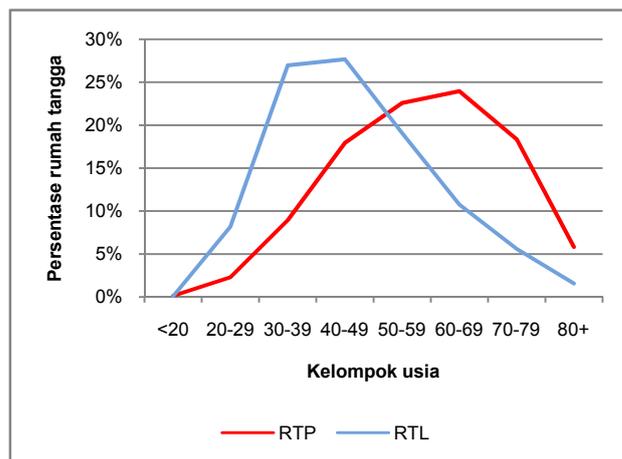
Ada kemungkinan angka sesungguhnya dari RTP lebih besar dari yang tercatat dalam data resmi akibat kesepakatan sosial terkait peran laki-laki dan perempuan di rumah tangga yang didukung oleh UU Pernikahan No. 1 (1974) Republik Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa kepala keluarga adalah suami atau laki-laki. Panduandari BPS saat ini menyatakan bahwa kepala rumah tangga dapat didefinisikan sebagai: (i) orang yang bertanggung jawab untuk kebutuhan harian rumah tangga atau (ii) orang yang dapat dianggap sebagai kepala rumah tangga. Karena hanya ada satu orang yang dapat disebut sebagai kepala rumah tangga maka logika mengatakan konvensi mempengaruhi dan seorang laki-laki akan dicatat kepala rumah tangga bahkan jika ia tidak ada atau jika perempuanlah yang sebetulnya bertanggung jawab untuk memelihara rumah tangga. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang merupakan sebuah organisasi nasional menganggap bahwa sangat mungkin terdapat estimasi yang terlalu rendah untuk jumlah RTP di Indonesia[3].

⁵Salah temuan relevan dari penelitian ini adalah, misalnya, bahwa kondisi konsumsi per kapita sesungguhnya, rumah tangga yang dikepalai oleh janda cenderung dianggap sebagai lebih miskin berdasarkan definisi berbasis masyarakat dibandingkan dengan definisi berbasis PMT [2].

3.2. Usia dan status pernikahan kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki

Proporsi kepala RTP yang lebih tinggi ditemui di kelompok usia yang lebih tua dibandingkan dengan laki-laki seperti yang diperlihatkan di Gambar 1. Di antara rumah tangga di desil satu sampai tiga, usia rata-rata kepala RTP adalah 55 tahun sedangkan untuk kepala RTL, rata-ratanya adalah 46 tahun. Hanya 7% dari semua kepala RTL berada di atas usia 60 sementara 24% kepala rumah tangga perempuan berada di kelompok usia lanjut. Sementara itu, hanya 11% dari kepala rumah tangga perempuan berada di usia dibawah 40 dibandingkan 35% pada kelompok kepala RTL.

Gambar 1 Distribusi (persentase) RTP dan RTL berdasarkan kelompok usia, desil1-3(BDT)



Tabel 2 memperlihatkan bahwa untuk desil satu sampai tiga, kisaran usia modus (diarsir) adalah 60-69 untuk kepala rumah tangga perempuan dan 40-49 untuk kepala rumah tangga laki-laki. Kesenjangan yang besar antara usia kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki kelihatannya berkontribusi terhadap banyak perbedaan lainnya yang teramati seperti dalam hal status pernikahan dan prevalensi disabilitas seperti yang didiskusikan di bagian selanjutnya laporan ini.

Tabel 2 Jumlah rumah tangga berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin kepala rumah tangga, desil 1-3 (BDT)

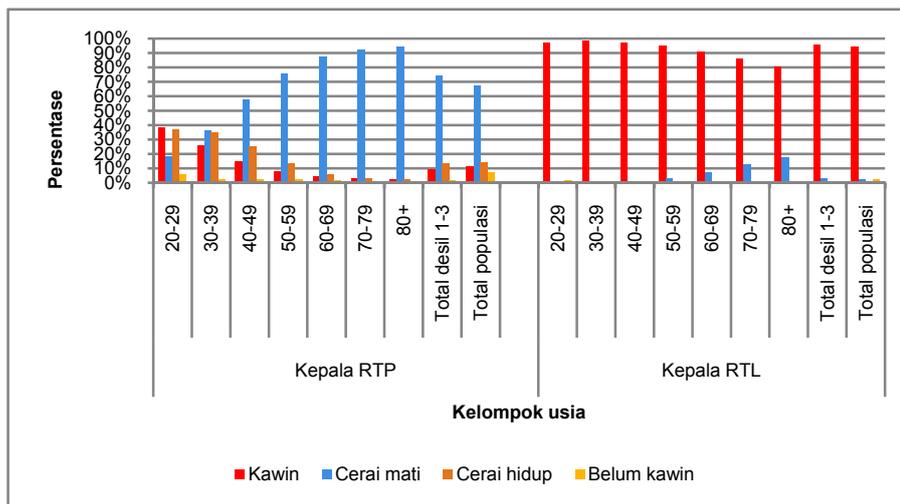
Kelompok usia	Desil 1-3			Total populasi		
	RTP	RTL	Total	RTP	RTL	Total
<20	3.896	14.824	18.720	207.878	254.119	461.997
20-29	65.472	1.282.827	1.348.299	791.895	6.230.610	7.022.505
30-39	255.837	4.229.940	4.485.777	911.321	14.725.188	15.636.509
40-49	513.957	4.339.722	4.853.679	1.576.533	14.260.533	15.837.066
50-59	647.052	2.993.243	3.640.295	1.930.392	9.858.396	11.788.788
60-69	686.216	1.689.044	2.375.260	1.724.029	4.777.261	6.501.290
70-79	525.386	879.659	1.405.045	1.065.513	1.978.603	3.044.116
80+	166.548	248.898	415.446	330.839	534.482	865.321
Total	2.864.364	15.678.157	18.542.521	8.538.400	52.619.192	61.157.592

Profil status pernikahan untuk kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki cukup berbeda (lihat Gambar 2). Status pernikahan merupakan indikator yang dikumpulkan dalam data PLS termasuk empat pilihan: lajang, menikah, bercerai, dan janda mati. Menjadi janda mati kelihatannya merupakan alasan utama untuk perempuan yang terdata sebagai kepala rumah tangga (75%). Data status pernikahan lain untuk kepala rumah tangga adalah bercerai (14%), menikah (10%), dan lajang (2%). Sebaliknya, hampir semua kepala rumah tangga pria berstatus menikah (96%). Proporsi ini cukup konsisten di semua desil.⁶

⁶ Dua variasi di dalam tiga desil termiskin adalah bahwa di antara kepala rumah tangga perempuan, persentase yang menikah di desil termiskin lebih tinggi (16 persen), dibandingkan dengan desil dua (10 persen) dan desil tiga (9,5 persen) dan desil termiskin terdiri dari proporsi janda mati yang sedikit lebih kecil dibandingkan di desil yang lebih tinggi (16 persen) dibandingkan dengan desil kedua (10 persen) dan desil tiga (9,5 persen)

Pola status pernikahan ini bervariasi di semua kelompok usia, terutama untuk kepala RTP. Misalnya, hanya sekitar 33% kepala RTP berusia di bawah 50 tahun yang berstatus janda mati sedangkan 80% dari mereka yang berusia di atas 50% adalah janda mati. Persentase yang lebih tinggi ditemukan untuk kepala RTL yang berstatus menikah di semua tingkatan usia. Hanya 4% dari kepala RTL yang berusia lebih dari 50 tahun adalah duda mati dan angka status duda mati ini hanya 18% meskipun angka ini memuncak di kelompok usia 80 tahun. Pola-pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki menikah lagi setelah kematian pasangannya sedangkan perempuan tidak.

Gambar 2 Status pernikahan berdasarkan kelompok usia kepala RTP dan RTL di desil 1-3 (BDT) dan populasi (Sensus Penduduk2010)



Sebagai patokan untuk perbandingan, data Sensus Penduduk2010 memperlihatkan pola yang serupa. Menurut Sensus Penduduk, 10% dari kepala RTP berstatus menikah dan 65% di antaranya adalah janda. Gambaran untuk kepala RTL adalah 94% dan 2%, secara berurutan. Jelas bahwa tidak biasa bagi perempuan yang berstatus menikah didata sebagai kepala rumah tangga. Dalam kasus ini, pengakuan perempuan menikah sebagai kepala rumah tangga mungkin dikaitkan dengan tidak adanya suami atau disabilitas atau penyakit kronis yang diderita suami (lihat subbab 3.6).

3.3. Jumlah dan usia laki-laki dan perempuan di rumah tangga miskin

Seperti yang terlihat di Tabel 3, secara keseluruhan Indonesia memiliki rasio Laki-Laki terhadap Perempuan yang hampir sama meskipun terdapat perbedaan kecil seperti perbedaan 0,7% yang tercatat dalam Sensus Penduduk 2010 yang menunjukkan bahwa laki-laki 1,62 juta lebih banyak daripada perempuan. Menurut Basis Data Terpadu, secara total terdapat 38,14 juta laki-laki dan 37,35 juta perempuan di tiga desil terendah. Di desil terendah, perbedaan antara jumlah laki-laki dan perempuan memperlihatkan angka terbesar dengan jumlah laki-laki 630.000 lebih banyak (51%) daripada perempuan 49%).⁷ Perbedaan ini terbalik di desil ketiga dengan sedikit lebih banyak perempuan (50,2%) dibandingkan laki-laki (49,8%) yang sangat mendekati persentase di seluruh populasi.

dan desil termiskin mencakup proporsi jendela yang sedikit lebih kecil daripada desil yang lebih tinggi (68 persen di desil satu, 75 persen di desil dua dan 78 persen di desil tiga).

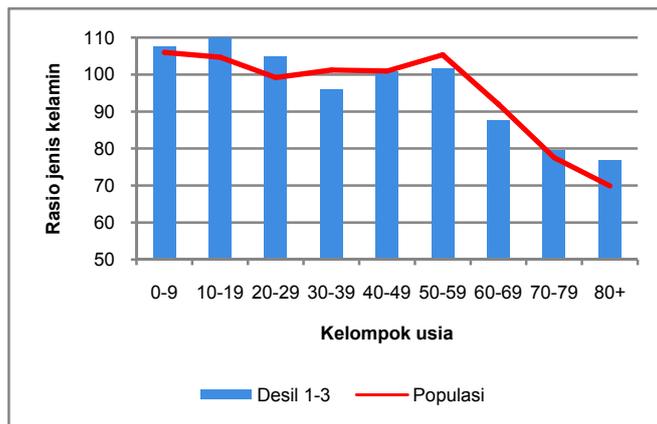
⁷Ini mungkin indikasi asosiasi antara kemiskinan dan morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi secara proporsional untuk perempuan yang sesuai dengan tren dunia. Sebagai contoh, 2012 World Development Report membahas fakta bahwa angka anak perempuan dan perempuan yang meninggal dunia relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dibandingkan dengan di negara berpendapatan tinggi[4].

Tabel 3 Jumlah dan persentase laki-laki dan perempuan di desil 1-3 (BDT) dan total populasi (Sensus Penduduk 2010)

Sumber	Desil	Jumlah Individu			Persentase Individu		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
BDT	Desil 1	15.469.679	14.835.000	30.304.679	51,0%	49,0%	100%
	Desil 2	12.122.762	11.882.226	24.004.988	50,5%	49,5%	100%
	Desil 3	10.544.216	10.633.284	21.177.500	49,8%	50,2%	100%
	Total: Desil 1-3	38.136.657	37.350.510	75.487.167	50,5%	49,5%	100%
SP 2010	Total populasi	119.630.913	118.010.413	237.641.326	50,3%	49,7%	100%

Terdapat sejumlah perbedaan yang teramati antara rasio jenis kelamin spesifik untuk usia⁸ di tiga desil terendah dan di seluruh populasi (lihat Gambar 3), meskipun trend keseluruhan utamanya sama, dengan rasio jenis kelamin tertinggi di kelompok usia di bawah 20 tahun dan menurun dengan tetap mulai usia 60 tahun. Salah satu perbedaannya adalah rasio laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan di desil yang paling miskin dibandingkan di populasi umum untuk kelompok usia di bawah 30 tahun. Sementara itu, untuk kelompok usia 30-39, rasio jenis kelamin lebih rendah di desil satu sampai tiga dibandingkan dengan populasi keseluruhan (96 berbanding 101). Ada beberapa factor yang mungkin bisa mempengaruhi pola rasio jenis kelamin ini, termasuk angka morbiditas laki-laki dan perempuan di desil yang lebih miskin relatif terhadap desil lain dan pola migrasi tertentu seperti migrasi laki-laki ke luar yang tinggi.

Gambar 3 Rasio jenis kelamin spesifik usia di desil 1-3 (BDT) dan populasi (Sensus Penduduk 2010)



Analisa sub nasional menunjukkan adanya variasi yang besar dalam hal rasio jenis kelamin spesifik usia antar provinsi dengan sejumlah rasio tertinggi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua, dan rendah secara ekstrim di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Perbedaan yang lebih besar dalam jumlah laki-laki dan perempuan, terutama di kelompok usia subur dan usia kerja (15-65) memiliki kisaran implikasi untuk kesuburan, komposisi rumah tangga, dan pola pekerjaan, sehingga terdapat implikasi yang besar terhadap strategi penurunan kemiskinan. Tabel data provinsi diberikan di Lampiran 1.

3.4. Ukuran rumah tangga dan ketergantungan

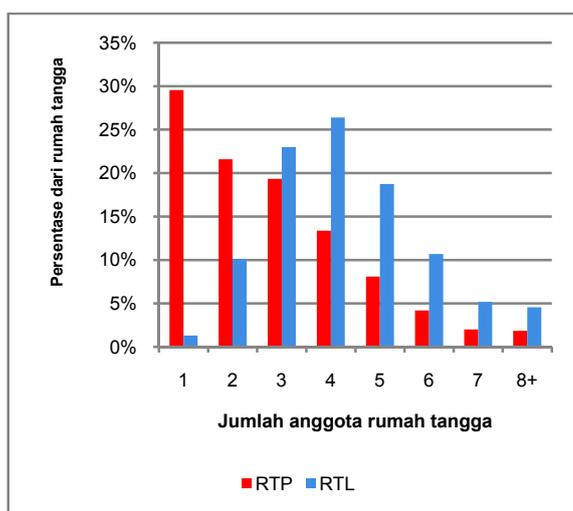
Gambar 4 memperlihatkan bahwa RTL cenderung lebih besar daripada RTP. RTL di tiga desil terendah memiliki ukuran rumah tangga rata-rata lima anggota dibandingkan dengan empat anggota di RTP. Di antara desil satu sampai tiga, 70% RTP memiliki 3 anggota rumah tangga atau lebih sedikit, sementara 66% RTL memiliki empat atau lebih anggota. Pola perbedaan gender ini cukup konsisten dengan data penduduk yang ada [5].

⁸ Ini adalah angka laki-laki per 100 perempuan.

Dari hampir 850.000 rumah tangga yang hanya terdiri dari satu orang dan tercatat di Basis Data Terpadu, 80% di antaranya dikepalai oleh perempuan. Tigapuluh persen (30%) dari semua RTP dalam basis data adalah rumah tangga yang hanya terdiri dari satu orang.

Untuk rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki dan perempuan, rumah tangga yang ukurannya lebih besar lebih terwakili di desil yang paling miskin dibandingkan di desil dua dan tiga (Tabel 4). Dari semua rumah tangga dengan satu anggota, misalnya, hanya 10% berada di desil satu dibandingkan dengan 30% di desil dua dan 60% di desil tiga. Sementara itu, lebih dari setengah dari semua rumah tangga dengan anggota enam orang atau lebih berada di desil satu. Pola ini serupa untuk RTP dan RTL.

Gambar 4 Ukuran RTP dan RTL di desil 1-3 (BDT)



Tabel 4 Ukuran rumah tangga berdasarkan desil dan jenis kelamin kepala rumah tangga di desil 1-3 (BDT)

Jumlah anggota rumah tangga	RTP				RTL			
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Total: Desil 1-3	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Total: Desil 1-3
1	72.373	258.228	515.693	846.294	26.474	61.069	118.763	206.306
2	82.718	209.888	325.717	618.323	291.243	564.364	730.320	1.585.927
3	113.882	198.736	241.374	553.992	816.046	1.317.291	1.471.587	3.604.924
4	115.066	135.814	132.320	383.200	1.337.673	1.498.998	1.301.083	4.137.754
5	91.856	76.259	63.810	231.925	1.252.694	979.027	708.622	2.940.343
6	58.066	35.079	26.940	120.085	892.152	477.161	308.250	1.677.563
7	31.939	14.766	10.977	57.682	490.741	197.441	121.253	809.435
8+	34.220	10.690	7.953	52.863	505.635	130.176	80.094	715.905
Total	600.120	939.460	1.324.784	2.864.364	5.612.658	5.225.527	4.839.972	15.678.157

Seperti yang diperlihatkan di Tabel 5, RTP memiliki rasio ketergantungan rata-rata yang mendekati tetapi sedikit lebih tinggi⁹ dibandingkan dengan RTL (61% dan 59%, secara berurutan). Rasio ketergantungan anak lebih rendah di RTP (37% versus 51%) dan rasio ketergantungan usia lebih tinggi di RTP (24% versus 8%). Terdapat sejumlah variasi antara provinsi, dengan Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat memiliki rasio ketergantungan rata-rata dan anak yang tinggi dan DI Yogyakarta dan Jawa Timur memiliki rasio ketergantungan usia yang lebih tinggi. Data provinsi dimasukkan di Lampiran 1.

⁹ Rasio ketergantungan usia adalah rasio orang yang bergantung (didefinisikan sebagai mereka yang berusia kurang dari 15 atau lebih dari 64) terhadap populasi usia produktif (didefinisikan sebagai usia 15-64).

Tabel 5 Rasio ketergantungan untuk RTP dan RTL di desil 1-3 (BDT)

Rasio ketergantungan	RTP	RTL	Total
Keseluruhan ((usia<15 + usia>64)/usia 15-64))	61%	59%	59%
Anak(usia<15/usia 15-64)	37%	51%	49%
Usia(usia>64/usia 15-64)	24%	8%	10%

3.5. Kepemilikan kartu tanda penduduk

Karena kepemilikan kartu identitas mungkin merupakan persyaratan untuk menerima berbagai program dan tunjangan dari pemerintah, perbedaan gender dalam variabel ini secara khusus terkait dengan pemaksimalan efektivitas strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia. PPLS bertanya mengenai apakah anggota rumah tangga memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi), KTP dan SIM sekaligus, atau tidak memiliki kartu identitas sama sekali. Hasil ini dirangkum dalam Tabel 6 dan divisualisasi di Gambar 5. Secara umum, perbedaan yang signifikan pada kepemilikan kartu identitas antara kepala RTP dan RTL dapat diobservasi. Di ketiga desil terendah, 88% kepala RTL memiliki KTP (termasuk 4% dengan KTP dan SIM sekaligus) dibandingkan dengan 79% kepala RTP (termasuk 0,2% yang memiliki kedua jenis identifikasi tersebut). Sedikit sekali kepala rumah tangga (kurang dari 1%) hanya memiliki SIM dan tidak memiliki KTP. Dengan kata lain, sementara hanya 12% kepala RTL tidak memiliki kartu identitas, angka untuk kepala RTP jauh lebih tinggi dengan angka 21%. Angka tidak memiliki kartu identitas pada pasangan kepala rumah tangga juga tinggi yaitu 19% dan konsisten tanpa memandang jenis kelamin kepala rumah tangga. Angka ini seragam di ketiga desil terendah.

Selanjutnya, pola dalam kepemilikan kartu identitas antara kepala RTP dan RTL serupa dengan perbedaan gender yang ada di semua anggota rumah tangga laki-laki dan perempuan yang ada. Misalnya, di antara semua individu berusia lebih dari 20 dalam BDT, 15% laki-laki tidak memiliki kartu identitas dibandingkan dengan 21% perempuan. Perbedaan gender dalam kepemilikan SIM secara khusus terlihat menonjol di populasi ini dengan angka di bawah 1% untuk perempuan dibandingkan 5% untuk laki-laki. Ringkasnya, data BDT menunjukkan bahwa memperoleh identitas legal lebih sulit (atau lebih rendah prioritasnya) untuk perempuan termasuk untuk kepala RTP dibandingkan dengan kepala RTL di desil terendah.

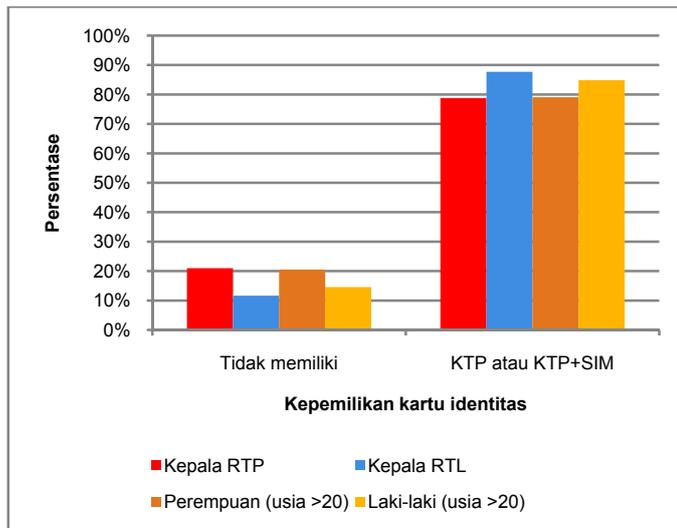
Terdapat sejumlah variasi tingkat lokal dalam proses dan persyaratan untuk KTP. Secara umum, KTP diberikan kepada penduduk berusia tujuhbelas tahun ke atas atau yang telah menikah. Aplikasi KTP memerlukan fotokopi kartu keluarga, surat keterangan penduduk dari administrasi desa, dan kadang-kadang akta lahir atau surat nikah. Terdapat biaya terkait dengan kartu ini, apakah untuk foto yang diharuskan atau biaya administrasi, terutama untuk kartu pengganti atau perubahan terhadap kartu yang sudah ada seperti pindah rumah atau perubahan status pernikahan.

Tabel 6 Kepemilikan kartu identifikasi oleh kepala RTP dan RTL dan individu berusia di atas 20 tahun di desil 1-3 (BDT)

	RTP		RTL		Semua rumah tangga		
	Kepala rumah tangga	Pasangan kepala rumah tangga	Kepala rumah tangga	Pasangan kepala rumah tangga	Laki-laki (usia >20)	Perempuan (usia >20)	Total
Ukuran populasi (N)	2.826.978	44.802	15.176.517	14.455.516	21.904.091	22.414.908	44.318.999
Tidak ada kartu identitas	21%	19%	12%	19%	15%	21%	18%
KTP	79%	77%	84%	81%	81%	79%	80%
SIM	0%	1%	1%	0%	1%	0%	1%
Keduanya (KTP dan SIM)	0%	2%	4%	0%	4%	0%	2%

*Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan dengan alasan ketiadaan data.

Gambar 5 Kepemilikan kartu identitas kepala rumah tangga, dan perempuan dan laki-laki berusia lebih dari 20 tahun, desil 1-3 (BDT)



* Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan untuk alasan ketiadaan data.

PPLS tidak mengumpulkan data terkait jenis identifikasi lain terutama kartu keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau akta lahir. SKTM dapat memudahkan pemegangnya mengakses program perlindungan sosial dan biasanya tersedia di kepala desa. Dalam hal ini akta kelahiran semakin diperlukan untuk anak agar bisa didaftarkan di sekolah dan kemudian di berbagai titik lain dalam siklus kehidupan. Dalam hal mengeksplorasi perbedaan gender dalam mengakses program penurunan kemiskinan, variabel-variabel ini akan berguna untuk pengumpulan data di masa datang.

3.6. Disabilitas dan penyakit kronis

◆ Prevalensi disabilitas dan penyakit kronis

Survei PPLS mengumpulkan informasi terkait apakah anggota rumah tangga mengalami disabilitas atau penyakit kronis dan jika ya, apa jenisnya.¹⁰ Data di Tabel 7 memperlihatkan bahwa di antara rumah tangga di tiga desil terendah, proporsi kepala RTP (4%) yang memiliki disabilitas tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan kepala RTL (2%). Kondisi ini mungkin terkait pada usia kepala RTP yang lebih tua. Pola yang lebih mengejutkan ditemui ketika kita memfokuskan perhatian kepada pasangan kepala RTP yang memiliki angka disabilitas yang jauh lebih tinggi (10%).

Tabel 7 Prevalensi disabilitas dan penyakit kronis RTP dan RTL, desil 1-3 (BDT)

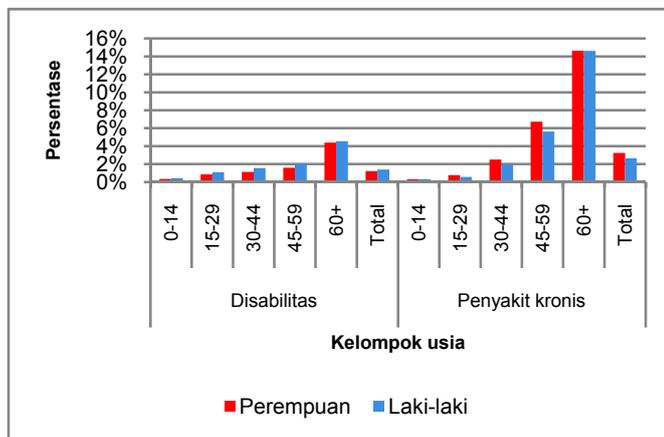
	Jumlah individu dengan disabilitas			Persentase individu dengan disabilitas		
	RTL	RTP	Total	RTL	RTP	Total
Kepala	265.382	101.235	366.617	2%	4%	2%
Pasangan	115.648	4.403	120.051	1%	10%	1%
Anggota lain	354.310	107.530	461.840	3%	5%	3%
	Jumlah individu dengan penyakit kronis			Persentase individu dengan penyakit kronis		
Kepala	824.781	331.107	1.155.888	5%	12%	6%
Pasangan	585.870	4.945	590.815	4%	11%	4%
Anggota lain	328.049	69.719	397.768	2%	4%	3%

* Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan untuk alasan ketiadaan data.

¹⁰ Perhatikan bahwa mungkin terdapat margin eror karena data ini didasarkan pada jawaban yang dilaporkan sendiri oleh rumah tangga dan bukan diagnosis oleh profesional medis. Mungkin juga terdapat kebingungan antara rumah tangga atau surveyor terkait apa yang dimaksud disabilitas.

Di antara semua laki-laki dan perempuan di tiga desil terendah, prevalensi disabilitas yang dilaporkan serupa antara laki-laki (1,2%) dan perempuan (1,4%). Seperti yang terlihat di Gambar 6, angka disabilitas pada laki-laki dan perempuan tetap serupa di semua kelompok usia dengan prevalensi terendah (kurang dari 1%) di kalangan anak-anak dan dewasa muda dengan usia kurang dari 30, dan angka tertinggi (di atas 4%) di antara mereka yang berusia 60 tahun.

Gambar 6 Persentase disabilitas dan penyakit kronis yang dilaporkan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok usia, desil 1-3 (BDT)



* Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan untuk alasan ketiadaan data.

Perbedaan gender dalam frekuensi penyakit kronis yang dilaporkan dalam PPLS di kalangan perempuan, kepala RTP dan pasangannya memperlihatkan pola serupa dengan analisa prevalensi disabilitas. Secara keseluruhan, sekitar 3% individu melaporkan mengalami penyakit kronis dan angka itu sama untuk laki-laki dan perempuan. Prevalensi penyakit kronis yang dilaporkan ini konsisten di ketiga desil dengan angka yang jauh lebih tinggi di kelompok usia yang lebih tua (lihat Gambar 6).

Kepala RTP lebih sering melaporkan penyakit kronis dibandingkan laki-laki yang sekali lagi mungkin terkait dengan usia mereka yang lebih tua. Proporsi kepala RTL di tiga desil terendah yang melaporkan penyakit kronis (12%) lebih dari dua kali lipat untuk kepala RTL (5%) (lihat Tabel 7).

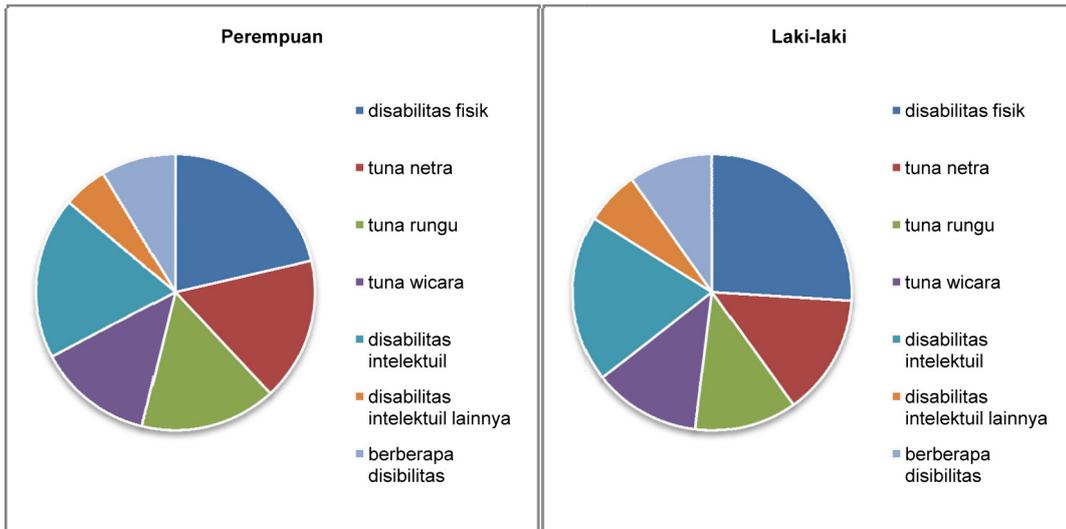
Pasangan kepala RTP juga terlihat lebih mungkin mengalami penyakit kronis (11%) dibandingkan dengan pasangan kepala RTL (4%). Seperti yang terlihat sebelumnya (lihat subbab 3.1), rata-rata 10% RTP menikah dan kelompok ini lebih terwakili di desil terendah dan di kohor usia yang lebih muda. Di antara kelompok ini, kelihatannya penyakit atau disabilitas pasangan laki-laki dalam sebagian kasus menjadi alasan utama perempuan secara resmi dianggap sebagai kepala rumah tangga.

◆ Jenis disabilitas dan penyakit kronis

Gambar 7 memperlihatkan jenis-jenis disabilitas berbeda¹¹ yang dilaporkan oleh laki-laki dan perempuan di tiga desil terendah. Secara keseluruhan, disabilitas yang paling sering dilaporkan adalah disabilitas fisik, pembelajaran (intelektual), pengelihatian, dan pendengaran. Penyebaran relatif dari setiap jenis disabilitas serupa baik untuk laki-laki dan perempuan dengan sedikit perbedaan. Secara umum, laki-laki lebih mungkin menderita disabilitas fisik dibandingkan dengan perempuan sementara perempuan lebih sering dilaporkan memiliki masalah pendengaran. Pola perbedaan gender yang digambarkan di sini serupa ketika membandingkan kepala RTP dan RTL.

¹¹ Perhatikan bahwa terminologi untuk jenis disabilitas yang digunakan dalam dokumen ini adalah terminologi bahasa Inggris yang lebih disukai (seperti yang disarankan oleh organisasi hak orang-orang disabel) dan bukan terjemahan literal dari kata Indonesia yang digunakan dalam PPLS 2011.

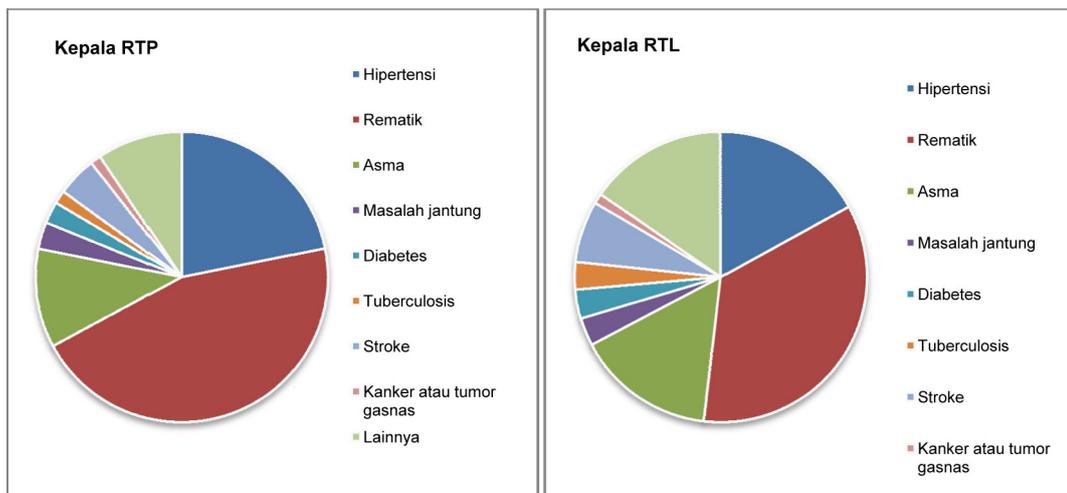
Gambar 7 Sebaran jenis disabilitas pada laki-laki dan perempuan, desil 1-3 (BDT)



*Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan untuk alasan ketiadaan data.

Gambar 8 menunjukkan bahwa penyakit kronis yang paling sering dilaporkan oleh kepala RTP dan RTL adalah rematik, hipertensi, dan asma. Frekuensi relatif jenis penyakit yang berbeda tidak muncul bervariasi secara signifikan antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 8 Sebaran jenis penyakit kronis pada kepala rumah tangga, desil 1-3 (BDT)



* Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan untuk alasan ketiadaan data.

3.7. Pendidikan

Kepala RTP di tiga desil terendah memiliki kemungkinan yang lebih rendah dibandingkan dengan kepala RTL untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan (lihat Tabel 8). Secara keseluruhan, sebaran kepala rumah tangga tanpa pendidikan atau hanya berpendidikan sekolah dasar cukup tinggi untuk perempuan (91%) dan laki-laki (79%). Hanya 52% dari kepala RTP melaporkan telah menyelesaikan setidaknya pendidikan tingkat dasar dibandingkan dengan 74% kepala RTL. Lebih lanjut, 9% kepala RTP telah menyelesaikan setidaknya SMP dibandingkan dengan 22% kepala RTL dan untuk tingkat SMA, angkanya adalah 3% dan 8%, secara berurutan. Kurang dari 1% kepala rumah tangga dari kedua jenis kelamin menyelesaikan pendidikan tersier.

Tabel 8 Tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan pada RTP dan RTL berdasarkan desil (BDT) dan di populasi (Susenas 2010)

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki	Desil 1-3				Populasi			
	RTP		RTL		RTP		RTL	
	Kepala	Semua Anggota	Kepala	Semua Anggota	Kepala	Semua Anggota	Kepala	Semua Anggota
Ukuran populasi (N) ¹²	1.796.129	2.864.331	13.687.798	15.675.522	6.953.008	8.951.498	51.186.457	53.675.798
Tidak Punya Ijazah	48%	36%	26%	13%	36%	24%	18%	7%
SD	43%	30%	52%	38%	30%	20%	33%	23%
SMP	6%	19%	14%	28%	12%	18%	17%	24%
SMA	3%	14%	8%	19%	16%	28%	24%	34%
Pendidikan tersier	0%	1%	0%	1%	6%	10%	8%	13%

*Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan untuk alasan ketiadaan data.

Sangat bermanfaat juga untuk meneliti tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh anggota rumah tangga lainnya. Seringkali anggota rumah tangga lain mungkin lebih berpendidikan daripada kepala rumah tangga akibat pola umum penyelesaian pendidikan yang lebih tinggi di kalangan generasi muda, misalnya. Tabel 8 memperlihatkan bahwa rata-rata, tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan dalam setiap rumah tangga (oleh anggota mana saja) lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan tingkat penyelesaian pendidikan kepala rumah tangga. Meskipun demikian, disparitas gender tetap ditemui antara RTP dan RTL. Misalnya, hanya 34% dari RTP memiliki anggota rumah tangga (ART) yang menyelesaikan pendidikan SMP atau lebih tinggi sementara angka yang sama adalah 48% pada RTL. Sisi kanan tabel berfokus pada populasi secara utuh dengan angka penyelesaian sekolah di kalangan kepala rumah tangga dan anggotanya lebih tinggi dibandingkan di desil terendah tetapi kesenjangan gender bermakna masih ditemui.

Sebagai perbandingan, Tabel 9 memperlihatkan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam hal tingkat pendidikan tertinggi individu pada perempuan dan laki-laki di desil 1-3 atau di populasi seluruhnya yang mungkin merupakan refleksi dari kemajuan Indonesia dalam mencapai keseimbangan untuk pendaftaran anak perempuan dan laki-laki di sekolah.

Tabel 9 Tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh perempuan dan laki-laki di desil 1-3 (BDT), dan di populasi (Susenas 2010)

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki	Desil 1-3		Populasi	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Ukuran Populasi (N) ¹³	28.883.651	30.941.515	97.445.675	102.476.488
Tidak Punya Ijazah	35%	33%	29%	27%
SD	42%	41%	30%	28%
SMP	16%	17%	18%	18%
SMA	8%	9%	18%	21%
Pendidikan Tersier	0%	0%	6%	6%

*Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan dengan alasan ketiadaan data.

Angka pencapaian pendidikan ini memiliki implikasi penting untuk strategi sosialisasi atau penyebaran informasi untuk berbagai program perlindungan sosial. Agar RTP secara efektif terjangkau, bentuk informasi tak tertulis kelihatannya dibutuhkan karena adanya transisi generasi dalam pencapaian pendidikan yang belum selesai. Hanya 36% RTP telah menyelesaikan pendidikan dasar dan tidak dapat diasumsikan bahwa rumah tangga ini dapat dengan mudah mencari orang untuk membantu mereka dengan persyaratan-persyaratan program yang membutuhkan kemampuan membaca yang bersifat dasar sekalipun.

¹² Perhatikan bahwa terdapat sejumlah besar angka yang hilang dalam jawaban terhadap pertanyaan ini dalam PPLS. Persentase di tabel ini didasarkan pada jumlah kepala RTP dan RTL yang jawabannya dicatat dan bukan jumlah total kepala RTP dan RTL di desil satu sampai tiga.

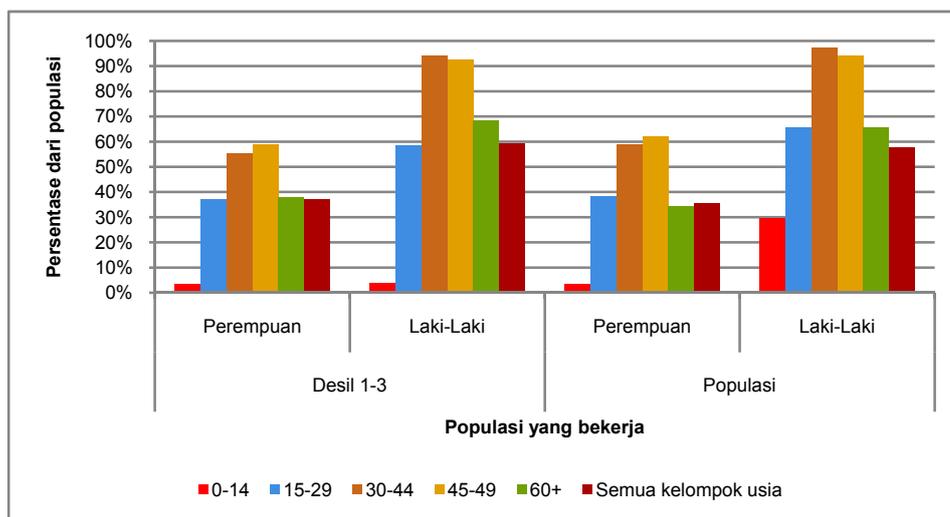
¹³ Perhatikan bahwa terdapat sejumlah besar angka yang hilang dalam jawaban terhadap pertanyaan ini dalam PPLS. Persentase di tabel ini didasarkan pada jumlah kepala RTP dan RTL yang jawabannya dicatat dan bukan jumlah total kepala RTP dan RTP di desil satu sampai tiga.

3.8. Pekerjaan

◆ Status Pekerjaan

Survei PPLS menanyakan tentang status pekerjaan semua anggota rumah tangga yang berusia di atas lima tahun, termasuk apakah mereka biasa bekerja, jumlah jam kerja per minggu sebelum waktu survei, dan sektor pekerjaannya. Secara keseluruhan, persentase kepala RTL yang lebih tinggi (91%) di desil satu sampai tiga yang dilaporkan bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan kepala RTP(60%).¹⁴ Perbedaan gender yang serupa ditemui di antara semua perempuan dan laki-laki di desil terendah. Di antara orang dewasa antara usia 30 dan 50 di desil terendah, misalnya, 93% laki-laki bekerja dibandingkan 57% perempuan. Gambar 9 memperlihatkan perbedaan dalam status kerja laki-laki dan perempuan yang dipilah berdasarkan kelompok usia. Persentase individu laki-laki dan perempuan yang bekerja di tiga desil terendah sama hanya di kelompok usia 0-14 tahun. Di kelompok-kelompok usia lain, persentase laki-laki yang bekerja lebih tinggi secara significant. Terdapat sedikit variasi dalam persentase ini di antara tiga desil terendah dan disparitas gender serupa terlihat jelas di antara populasi Indonesia secara utuh berdasarkan data Susenas 2010. Meskipun demikian, salah satu perbedaan yang jelas adalah bahwa Susenas menunjukkan angka laki-laki bekerja di usia empat belas tahun ke bawah di populasi yang lebih tinggi (30%), dibandingkan dengan desil terendah (4%). Tabel untuk tingkat provinsi untuk status pekerjaan kepala rumah tangga dicantumkan di Lampiran 1.

Gambar 9 Persentase perempuan dan laki-laki bekerja berdasarkan kelompok usia, desil 1-3 (BDT) dan populasi (Susenas 2010)



Harus dicatat bahwa kategori pilihan jawaban¹⁵ untuk pertanyaan pekerjaan dalam PPLS (dan di data Sensus Penduduk, karena PPLS didasarkan pada format pertanyaan ini) tidak secara spesifik memasukkan jam kerja yang dibayar dan tanpa bayaran di dalam rumah seperti memelihara rumah tangga dan pengasuhan anak, peran yang di Indonesia, seperti halnya di dunia, secara dominan dilakukan oleh anggota rumah tangga perempuan.¹⁶

◆ Jam kerja

Data resmi terkait apakah rumah tangga dikepalai oleh laki-laki atau perempuan mungkin tidak konsisten dengan tanggung jawab ekonomi atau pengambilan keputusan sesungguhnya untuk rumah tangga tersebut. Untuk mendalami hal ini, jam kerja oleh anggota laki-laki dan perempuan seperti

¹⁴ Perhatikan bahwa definisi 'bekerja' yang digunakan dalam subbab ini memilah individu yang bekerja selama minggu lalu dan mereka yang melaporkan bahwa mereka biasanya bekerja meskipun mereka tidak bekerja minggu lalu. Persentase individu dalam kategori yang disebutkan terakhir (sedang tidak bekerja) hanya 3 persen dari populasi desil satu sampai tiga.

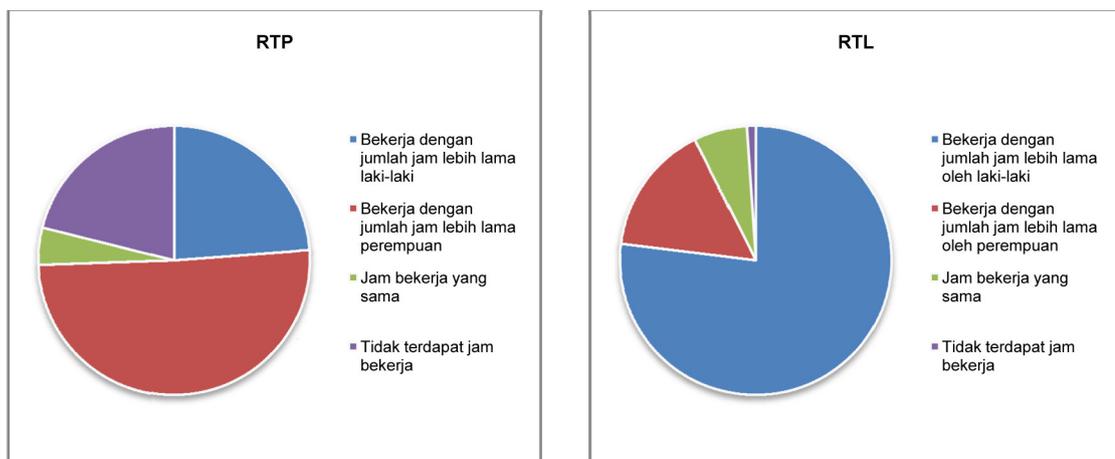
¹⁵ Kategori-kategori ini adalah 1. Bertanam padi/palawija sekunder; 2. Hortikultura; 3. Perkebunan; 4. Menangkap ikan; 5. Budi daya ikan; 6. Beternak; 7. Perhutanan dan pertanian lain; 8. Pertambangan/penggalian; 9. Industri pemrosesan; 10. Listrik dan gas; 11. Bangunan/konstruksi; 12. Perdagangan; 13. Hotel dan restoran; 14. Transportasi dan pergudangan; 15. Informasi dan komunikasi; 16. Keuangan dan asuransi; 17. Layanan pendidikan; 18. Layanan kesehatan; 19. Jasa sosial, pemerintah, pribadi; dan 20. Lain-lain.

¹⁶ Sebagai contoh lihat [6] yang mengutip data Susenas 2009 yang memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan dalam kerja yang tak dibayar di rumah jauh lebih tinggi dari laki-laki (sekitar 32 persen dibandingkan 8 persen).

yang tertangkap di data PPLS dianalisa untuk melihat apakah anggota rumah tangga laki-laki atau perempuan bekerja lebih lama dan apakah ini berbeda pada RTP dan RTL. Analisa ini memiliki keterbatasan karena lebih banyak jam yang dihabiskan untuk bekerja mungkin tidak dapat diterjemahkan sebagai lebih banyak pendapatan sehingga tidak mungkin untuk menentukan secara pasti jenis kelamin mana yang menghasilkan sumber pendapatan utama.¹⁷ Meskipun demikian, sejumlah pola menarik muncul seperti yang diperlihatkan di Gambar 10.

Secara keseluruhan, jumlah jam kerja lebih tinggi terlihat pada anggota rumah tangga laki-laki di mayoritas rumah tangga (69%), sementara anggota rumah tangga perempuan bekerja lebih lama hanya di 21% rumah tangga (10% sisanya tercatat memiliki jam yang sama atau tidak ada jam kerja untuk laki-laki dan perempuan). Meskipun demikian, persentase rumah tangga yang perempuannya bekerja lebih lama dari laki-laki mencapai 51% untuk RTP. Sebaliknya, laki-laki bekerja dengan jumlah jam kerja lebih lama di 77% RTL.

Gambar 10 Siapa yang bekerja dengan jumlah jam lebih lama di RTP dan RTL, desil 1-3(BDT)



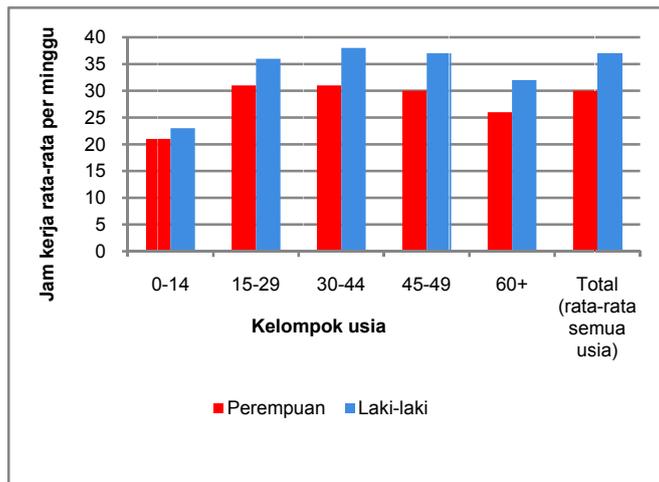
*Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan dengan alasan ketiadaan data.

Satu dari lima (21%) RTP, tidak terdapat jam bekerja (oleh anggota rumah tangga) yang sangat kontras dengan hanya 1% di RTL. Tiga perempat kepala rumah tangga perempuan berusia 60 tahun atau lebih. Meskipun beberapa dari RTP tanpa anggota rumah tangga yang bekerja ini mungkin bertahan dengan mengandalkan sumber pendapatan dari luar (seperti tunjangan atau bantuan lain dari keluarga dan teman) atau telah membangun sejumlah aset, tidak adanya orang yang menjadi sumber pendapat di dalam rumah tangga-rumah tangga ini membuat mereka rentan terhadap kemiskinan.

Dalam hal jumlah jam kerja per minggu, kepala rumah tangga laki-laki di desil terendah rata-rata bekerja lebih lama tujuh jam atau lebih jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga perempuan. Bahkan, perbedaan gender dalam jumlah jam kerja ditemui di semua kelompok usia yang diperlihatkan di Gambar 11. Perbedaan terkecil adalah dua jam per minggu untuk usia 14 ke bawah dan perbedaan terbesar adalah delapan jam per minggu di kelompok usia 30 sampai 44. Laki-laki dan perempuan bekerja di populasi umum bekerja rata-rata 6 jam atau lebih dibandingkan dengan yang terdapat di desil paling miskin tetapi disparitas gender yang sama tetap ditemui [8].

¹⁷ Mungkin sekali bahwa jam kerja perempuan menghasilkan lebih sedikit pendapatan daripada laki-laki yang bekerja dengan jumlah jam kerja yang sama. Pirmana menemukan bahwa pekerja perempuan menerima hanya 71-76 persen dari pendapatan laki-laki tahun 1999-2004 [7].

Gambar 11 Jam kerja rata-rata individu yang bekerja berdasarkan usia dan jenis kelamin, desil 1-3 (BDT)

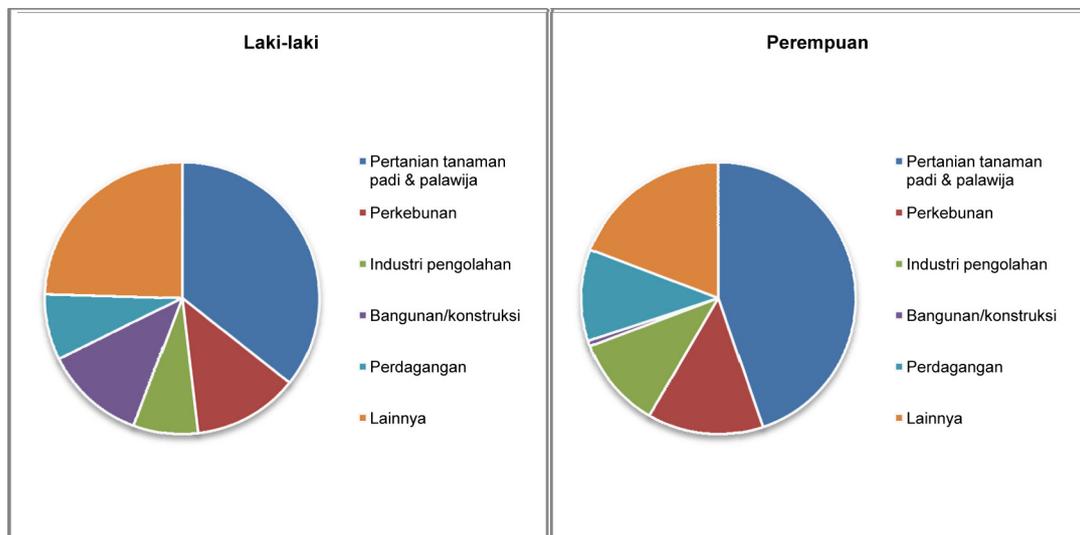


*Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan dengan alasan ketiadaan data.

◆ **Jenis pekerjaan**

Seperti yang diperlihatkan di Gambar 12, sektor utama pekerjaan untuk laki-laki dan perempuan di desil terendah adalah di sektor pertanian, khususnya padi dan palawija sekunder yang diikuti oleh sektor perkebunan. Perbedaan yang lebih menonjol antar jenis kelamin adalah bahwa 12% dari laki-laki yang bekerja memiliki pekerjaan di konstruksi sementara angka yang sama kurang dari 1% untuk perempuan dan persentase perempuan bekerja yang lebih tinggi ditemui di pertanian.

Gambar 12 Sebaran sektor pekerjaan yang paling sering ditemui untuk laki-laki dan perempuan bekerja, desil 1-3 (BDT)



*Catatan: Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dimasukkan dengan alasan ketiadaan data.

Sebaran relatif yang nampak untuk laki-laki dan perempuan di desil terendah serupa di antara kepala rumah tangga dari setiap jenis kelamin. Pola ini juga sama dengan yang ditemui di populasi umum kecuali bahwa persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor pertanian lebih tinggi di desil terendah dibandingkan dengan semua desil.

3.9. Akses terhadap program perlindungan sosial

Basis Data Terpadu mencakup data yang menunjukkan apakah rumah tangga menerima serangkaian program perlindungan sosial atau tidak. Data didasarkan pada jawaban dari rumah tangga dan hanya bisa digunakan sebagai indikasi sangat kasar terhadap cakupan relatif program 2011. Misalnya, sejumlah anggota rumah tangga dan enumerator survei mungkin tidak cukup memahami nama-nama program untuk memberikan jawaban yang benar. Seperti yang terlihat di Tabel 10, secara proporsional lebih sedikit RTP yang menerima Program Keluarga harapan (PKH) dan lebih sedikit lagi yang mengakses program Keluarga Berencana (KB). Kondisi ini tidak mengejutkan mengingat komposisi RTP dengan proporsi kepala rumah tangga berusia tua dan rumah tangga dengan satu anggota rumah tangga yang lebih tinggi (lihat subbab 3.4), yang mengimplikasikan bahwa secara proporsional lebih sedikit dari rumah tangga semacam ini mungkin memerlukan bantuan keluarga berencana atau memenuhi syarat untuk PKH (yang mengharuskan adanya anggota rumah tangga anak usia sekolah atau ibu hamil).

Tabel 10 Penerimaan program perlindungan sosial yang dilaporkan berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga, desil 1-3 (BDT)

	Jumlah Rumah Tangga			Persentase Rumah Tangga	
	RTP (N=2,864,364)	RTL (N=15,678,150)	Total	RTP	RTL
Program keluarga harapan (PKH)	64.799	489.947	554.746	2%	3%
Raskin	2.463.677	12.344.135	14.807.812	86%	79%
Jamkesmas	1.486.335	6.980.006	8.466.341	52%	45%
Asuransi Kesehatan Lain	103.728	662.564	766.292	4%	4%
Jamsostek	20.381	179.813	200.194	1%	1%
Keluarga berencana (KB)	241.934	6.870.489	7.112.423	8%	44%

Sebaliknya, secara proporsional lebih banyak RTP melaporkan menerima Raskin dan Jamkesmas. Untuk Raskin, 86% RTP melaporkan mengakses program dibandingkan dengan 79% untuk RTL. Untuk Jamkesmas, angkanya adalah 52% dan 45%, secara berurutan. Temuan ini konsisten dengan analisa WorldBank yang menemukan bahwa RTP jauh lebih mungkin untuk menerima program bantuan sosial utama (Raskin, Bantuan Langsung Tunai/BLT dan Jamkesmas), dengan tidak memandang tingkat konsumsi [1]. Analisa lanjutan di masa datang akan perlu membandingkan akses proporsional dan RTP terhadap tunjangan-tunjangan ini terkait syarat yang harus dipenuhi untuk dianggap memenuhi syarat menerima masing-masing program.

3.10. Akses terhadap air dan listrik

PPLS juga menanyakan sejumlah pertanyaan mengenai status ekonomi dan kondisi fisik rumah tangga yang digunakan untuk menilai status kesejahteraan rumah tangga dalam proses PMT. Seperti yang dilihat di Tabel 11, hanya terdapat perbedaan kecil antara RTP dan RTL. RTP memiliki angka yang sedikit lebih tinggi terkait sambungan listrik (86% dibandingkan dengan 83%), dan mengakses air minum dari sumber yang aman (60% dibandingkan dengan 57%).

Tabel 11 Sumber listrik dan air untuk RTP dan RTL, desil 1-3 (BDT)

	RTP	RTL
Ukuran populasi(N)	2.864.364	15.678.157
Sumber listrik:		
Listrik PLN	86%	83%
Listrik non PLN	4%	4%
Tidak ada listrik	10%	12%
Sumber air minum:		
Air botol	3%	4%
Air ledeng	8%	8%
Sumber aman	60%	57%
Sumber tidak aman	29%	31%

4. Isu-Isu Utama dan Rekomendasi

Meskipun secara keseluruhan jumlah laki-laki dibandingkan perempuan sesuai dengan pola internasional secara umum, perbedaan yang besar yang ditemui di tingkat provinsi harus lebih **didalami**: Misalnya, di Nusa Tenggara Barat, rasio jenis kelamin spesifik usia bergerak dari 106 laki-laki terhadap 100 perempuan di kelompok usia 10-19, ke 85 laki-laki terhadap 100 perempuan di kelompok usia 20-29 dan 30-39. Program penurunan kemiskinan berbasis pekerjaan akan perlu mempertimbangkan dampak ketiadaan laki-laki baik terhadap pekerjaan yang dibayar, peran reproduksi dan peran asuh. Di Papua, untuk kelompok usia 30-39 ada 97 laki-laki terhadap 100 perempuan, tapi untuk kelompok usia 40-49 dan 50-59 perbedaan lebih ekstrim, ada 130 dan 150 laki-laki berurutan terhadap 100 perempuan. *Faktor-faktor yang berkontribusi kelihatannya mencakup migrasi laki-laki yang masuk dalam jumlah yang sangat tinggi terkait dengan industri sumber daya alam dan transmigrasi masih perlu didalami*. Di dunia, pola semacam ini telah diasosiasikan dengan tingkat kekerasan yang tinggi, pertumbuhan seks komersial dan perilaku berisiko terkait, serta ketiadaan peran asuh [9, 10, 11].

Kelihatannya lebih banyak RTP dibandingkan dengan yang ditunjukkan oleh data dan kesepakatan saat ini untuk definisi RTP memberikan indikasi yang tidak memadai terhadap kisaran situasi domestik: Saat hasil penelitian ini ditulis, sebuah penelitian kedua dengan menggunakan perangkat pengumpulan data yang serupa dengan PPLS sedang dilaksanakan oleh PEKKA. Panduan untuk penelitian ini menyatakan '*kepala rumah tangga mungkin bukan suami. Ini berarti bahwa kepala rumah tangga adalah anggota rumah tangga yang memiliki peran lebih besar dalam pengambilan keputusan dan keuangan rumah tangga*' [12]. Selanjutnya, kategori untuk 'status pernikahan' telah dikembangkan untuk dapat secara lebih akurat mewakili situasi yang ada. Kategori ini adalah: Tidak menikah (2), Menikah dan tinggal di rumah yang sama (3), Menikah tetapi tidak tinggal di rumah yang sama (4), Menikah tetapi suami/istri meninggalkan keluarga (5) Cerai hidup (6) Cerai mati (7) Tidak menikah tetapi tinggal bersama. Penggunaan kategori-kategori ini akan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap komposisi rumah tangga dan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait jumlah perempuan yang bertanggung jawab untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, khususnya yang masuk ke dalam kategori 3 dan 4 di atas. Berdasarkan umpan balik PEKKA, sangat mungkin bahwa rumah tangga-rumah tangga ini tercatat sebagai RTL. *Direkomendasikan bahwa kegunaan dari kategori-kategori ini dalam penelitian PEKKA dan perbedaan yang ada dalam angka RTP harus dianalisa untuk dilihat apakah kategori ini dapat diadopsi sebagai standard di penelitian TNP2K selanjutnya*.

Pertanyaan masih tersisa untuk rumah tangga dengan lebih dari satu keluarga: Di dalam satu rumah tangga tempat banyak keluarga yang tinggal bersama yang mungkin terjadi karena alasan-alasan terkait kemiskinan, mungkin akan terdapat risiko kekurangan atau penyisihan dari bantuan sosial yang hanya diterima oleh kepala keluarga yang dinominasikan. Isu ini tidak hanya berlaku untuk RTP tetapi terdapat sejumlah faktor sosial ekonomi yang secara logis akan membenarkan bahwa kasus ini lebih mungkin terjadi di rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. *Analisa tambahan terkait hubungan rumah tangga yang dicatat dalam BDT akan membantu memahami rumah tangga dengan banyak keluarga dan kemudian apakah perlindungan sosial memang cukup untuk membantu anggota rumah tangga atau terlalu rendah*.

Saat ini RTP kelihatannya memiliki akses yang lebih baik ke perlindungan sosial: Penelitian World Bank mencatat bahwa RTP jauh lebih mungkin menerima BLT, Jamkesmas, dan Raskin, tanpa memandang tingkat konsumsi [1]. Kondisi ini mungkin mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kriteria yang berbeda dengan yang diterapkan secara resmi melalui proxy means testing untuk menentukan kemiskinan sehingga pemenuhan syarat, dan sebagai akibatnya RTP 'melompati antrean'. Isu ini telah dieksplorasi di sejumlah penelitian [1, 13]. Selain itu, pertanyaan yang menarik untuk penelitian selanjutnya adalah hingga batas mana perbedaan gender yang teramati dalam BDT merefleksikan kondisi sesungguhnya di antara orang miskin atau mungkin mengindikasikan bahwa mungkin terdapat bias gender yang tidak sengaja dalam model PMT yang digunakan untuk memilih rumah tangga miskin. *Dengan memandang bahwa kelompok ini mewakili setidaknya 15% rumah*

tangga miskin dan rentan, pemahaman terhadap situasi khusus mereka sangat penting karena perhatian yang berkesinambungan terhadap apakah kriteria target sesuai atau tidak menjadi penting. Kondisi ini harus dikaji melalui perbandingan antara analisa BDT, penelitian PEKKA, dan sumber data lainnya.

Perempuan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mempunyai identifikasi resmi dibandingkan dengan laki-laki: Penelitian terdahulu [3] telah menyoroti hambatan terhadap akses perlindungan sosial dan layanan-layanan lain yang disebabkan oleh tidak adanya kartu identitas formal. Alasan tidak memiliki Kartu Identitas dapat dikarenakan adanya ketidakmampuan untuk membayar biaya pengurusan kartu, tidak adanya identitas hukum yang berawal dari akte kelahiran, tidak dikenali secara hukum sebagai kepala rumah tangga, atau kurangnya pemahaman terhadap proses cara memperoleh kartu [3]. Sistem identifikasi dan persyaratan untuk memperoleh kartu identitas di Indonesia pada masa lalu bersifat tidak standar dan rumit, meskipun pada era reformasi terdapat janji untuk melakukan perbaikan sistem identifikasi baru yang saat ini sedang berjalan. Informasi anekdot¹⁸ menunjukkan bahwa Kartu Keluarga merupakan persyaratan paling penting untuk KTP. Meskipun demikian, di sejumlah daerah, peraturan setempat melarang perempuan memperoleh Kartu Keluarga yang menyebutkan bahwa mereka adalah kepala keluarga. Di daerah-daerah lain, untuk memperoleh Kartu Keluarga sebagai kepala keluarga memerlukan akte kelahiran, surat nikah dan kemudian surat cerai atau kematian jika tidak ada pasangan laki-laki. Semua ini memerlukan biaya sehingga dapat membuat masyarakat miskin tidak dapat memperolehnya, dan mungkin lebih sulit untuk perempuan miskin. Laporan awal dari pencacah lapangan PEKKA yang melakukan pendataan di tahun 2012 menunjukkan bahwa berbagai macam kartu dan surat itu diperlukan - seringkali dibutuhkan untuk masing-masing program perlindungan sosial – saat ini hal ini bisa menjadi hambatan [14]. Berbagai macam kartu dan surat memerlukan biaya (yang tidak selalu resmi) atau memerlukan proses aplikasi tertulis yang bisa sangat menyulitkan, atau bahkan menghalangi, mereka yang sangat miskin dan memiliki kemampuan membaca yang terbatas. *Dengan memandang pentingnya kepemilikan kartu identitas untuk mengakses program perlindungan sosial maka direkomendasikan bahwa analisa ini perlu diulang di tingkat kota/kabupaten. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada langkah-langkah spesifik yang perlu dilakukan dalam rangka memfasilitasi rumah tangga miskin dalam upaya memperoleh identifikasi. Lebih lanjut, agar rumah tangga tersebut dapat mengakses program perlindungan sosial dan memastikan bahwa RTP memiliki akses yang sama. Direkomendasikan juga putaran PPLS mendatang mengeksplorasi indikator-indikator yang paling sesuai untuk dimasukkan ke dalam pertanyaan ini. Hal ini mungkin mencakup pertanyaan tentang Kartu Keluarga, akte kelahiran, SKTM serta KTP. Potensi kartu akses tunggal juga harus didalami.*

RTP secara tidak proporsional dipengaruhi oleh penyakit kronis dan disabilitas, baik kepala rumah tangga itu sendiri, pasangannya, atau anggota rumah tangga lain. *Beban pemeliharaan tambahan dan apakah RTP memiliki akses yang memadai terhadap layanan dan dukungan kesehatan untuk anggota rumah tangga mereka mengharuskan pendalaman lebih lanjut.*

Tingkat pendidikan yang rendah, khususnya pada kepala RTP, kelihatannya menghambat sosialisasi dan akses terhadap proses pengaduan: meskipun Indonesia telah mencapai hasil yang sangat baik dalam hal pendidikan dasar universal dan paritas pendaftaran untuk pelajar laki-laki dan perempuan, efek dari akses yang buruk terhadap pendidikan di masa lalu masih ada di tingkat kepala rumah tangga. *Dengan 50% kepala RTP dan 30% kepala RTL di desil terendah tidak memiliki pendidikan atau tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar, bentuk sosialisasi dan prosedur pengaduan menjadi sangat penting.*

Partisipasi tenaga kerja perempuan di rumah tangga miskin secara khusus rendah: kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait sumber pendapatan untuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan yang tidak bekerja. Jika kepala RTP (dan dalam sejumlah kasus, beserta pasangannya) tidak bekerja maka mereka pasti bergantung pada sumber pendapatan lain yang mungkin bersifat tetap atau tidak. Meningkatkan partisipasi kerja perempuan dan kesetaraan upah akan menjadi komponen penting dalam strategi-strategi penanggulangan kemiskinan. Meskipun demikian,

¹⁸ Mencakup juga diskusi dengan manajemen PEKKA di Jakarta dan kader-kader di provinsi NTB, fasilitator PNPM di Ternate, dan pertemuan dengan berbagai LSM perempuan dan yang berfokus pada gender di Jakarta, Maluku Utara, NTT dan NTB.

pendekatan ini juga akan memunculkan masalah pada aspek asuh. Hubungan antara globalisasi, kemiskinan, dan pengasuhan telah dieksplorasi dalam sejumlah penelitian [15, 16], dengan salah satu temuan menunjukkan bahwa terdapat penolakan kuat untuk perubahan pembagian kerja domestik tidak dibayar dalam rumah tangga saat perempuan mengambil pekerjaan yang dibayar. Efek kondisi ini terhadap keluarga, terutama pada anak-anak yang mungkin menerima beban pengasuhan dapat merusak perkembangan dan pendidikan mereka sendiri. Hal ini mungkin menjadi justifikasi untuk pendalaman lebih lanjut karena terdapat hubungan logis terhadap pergerakan keluar dari kemiskinan yang berkesinambungan. Meskipun definisi kerja yang digunakan untuk BPS tidak mencakup kerja tidak dibayar, tetapi terdapat kemungkinan bahwa kerja domestik tidak dibayar di rumah biasanya tidak dianggap sebagai pekerjaan oleh rumah tangga atau pencacah dan secara umum tidak dihitung. Gambaran yang lebih spesifik mengenai pekerjaan domestik tanpa bayaran yang dilakukan perempuan dan laki-laki akan menyediakan pengakuan yang lebih besar, dan gambaran yang lebih realistis, terhadap peran-peran berbeda yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. *Jika digabungkan, faktor-faktor ini menjadi argumen untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial memperhatikan pemberdayaan dan peran domestik serta kesetaraan dan kesamaan eksternal.*

5. Kesimpulan

Analisa data dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial menurut jenis kelamin kepala rumah tangga dan jika mungkin anggota rumah tangga lain, telah mengidentifikasi sejumlah perbedaan penting dalam hal gender yang mungkin mempengaruhi kemampuan anggota rumah tangga untuk mengakses dan memperoleh keuntungan dari program perlindungan sosial dan inisiatif penanggulangan kemiskinan. Secara khusus hal ini mencakup area akses terhadap KTP, pendidikan, dan pekerjaan.

Analisa ini menemukan bahwa RTP tidak memiliki kemungkinan lebih besar untuk berada di kondisi yang lebih miskin daripada RTL, paling tidak berdasarkan klasifikasi *proxy-means tests* di Basis Data Terpadu. Meskipun demikian, beberapa faktor mungkin berperan pada kerentanan terhadap kemiskinan yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih rendah untuk menahan syok dari luar untuk RTP. Faktor-faktor ini mencakup komposisi RTP, karena rumah tangga ini cenderung lebih kecil ukurannya dan lebih mungkin memiliki kepala rumah tangga berusia lanjut serta anggota rumah tangga yang mengalami disabilitas atau penyakit kronis. Selain itu memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan perempuan pada umumnya.

Sejumlah karakteristik rumah tangga miskin memperlihatkan sedikit variasi antara RTP dan RTL, terutama untuk sektor kerja, kehamilan, air minum, dan sumber listrik.

Analisa deskriptif terhadap data di BDT yang diberikan dalam laporan ini menunjukkan kepada kita tentang *apa*. Namun, analisa ini tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait *mengapa*, atau *apa yang kita bisa lakukan terhadap situasi ini?* Oleh karena itu, penelitian ini harus dianggap sebagai pintu masuk untuk mengidentifikasi area-area tempat penelitian kualitatif atau inisiasi merancang metode campuran, atau kegiatan diskusi dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan spesifik atau protokol implementasi. Analisa awal ini menunjukkan adanya tiga prioritas terkait dengan perbedaan gender:

- Bentuk identifikasi apa yang diperlukan untuk mengakses perlindungan sosial? Apa hambatan untuk memperoleh identifikasi ini, terutama untuk perempuan dan kaum miskin, dan bagaimana mereka bisa mengatasinya?
- Bagaimana program perlindungan sosial dapat menjangkau rumah tangga yang kepala rumah tangganya tidak dapat membaca atau berpendidikan sangat rendah (situasi yang secara proporsional lebih sering ditemui pada RTP)? Strategi-strategi apa yang diperlukan untuk memastikan sosialisasi efektif dan mekanisme keluhannya?
- Bagaimana partisipasi tenaga kerja perempuan di rumah tangga miskin ditingkatkan tanpa dampak yang merusak terhadap pola pengasuhan atau tanpa beban kerja keseluruhan yang menghambat (dibayar dan tidak dibayar)?

Pertanyaan lain, seperti terkait dengan area pekerjaan dan kemiskinan dapat didalami melalui pengarusutamaan di penelitian spesifik sektor – yang dalam sejumlah kasus sudah direncanakan atau sedang berlangsung.

Analisa ini juga akan sangat bermanfaat jika diulang di tingkat daerah dan diintegrasikan dengan perencanaan dan proses penganggaran terkait kemiskinan.

6. Daftar Pustaka

1. World Bank (2012) *Targeting poor dan vulnerable people in Indonesia*. Jakarta: World Bank.
2. Alatas V, et al. (2012) Targeting the Poor: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. *American Economic Review*, 102(4): p. 1206-40.
3. Sumner C (2010) *Access to Justice: Empowering female heads of household in Indonesia*. Jakarta: PEKKA dan AusAID.
4. World Bank (2012) *World Development Report: Gender Equality dan Development*. Washington DC: World Bank.
5. Badan Pusat Statistik (2010) *Percentage of Households by Province, Sex of Household Headed dan Number of Household Members, 2009-2010*. Available from: http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=40¬ab=3.
6. Yumna A, et al. (2012) *The politics of gender dan social protection in Indonesia: opportunities dan challenges for a transformative approach*. London: Overseas Development Institute.
7. Pirmana V (2006) *Earnings Differential between Male-Female in Indonesia: Evidence from Sakernas Data*. Bandung: Padjadjaran University.
8. Badan Pusat Statistik (2010) *Sensus Penduduk Data 2010*. Available from: <http://www.bps.go.id/>.
9. Hesketh Therese, dan Xing Zhu Wei (2006) Abnormal sex ratios in human populations: Causes dan consequences. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(36): p. 13271-13275.
10. Liisanantti A, dan Beese K (2012) *Gendercide: The Missing Women?* Belgium: European Union.
11. UNFPA (2012) *Sex Imbalances at Birth: Current trends, consequences dan policy implications*. Bangkok: UNFPA.
12. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) (2012) *Petunjuk pengisian, istilah, dan pengertian dalam kuesioner keluarga Pendataan Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas Pekka (SPKBK - PEKKA)*. Jakarta: PEKKA.
13. Alatas V, et al. (2010) *How to target the poor: Evidence from a Field Experiment in Indonesia*. CEPR Public Policy Symposium, London School of Economics on 18-19 June.
14. (2012) *Personal communication, PEKKA Cadres Reflection Meeting*. 11-12 July.
15. Razavi S (2007) *The Political dan Social Economy of Care in a Development Context: Conceptual Issues, Research Questions dan Policy Options*. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
16. Kaber N (2007) *Marriage, Motherhood dan Masculinity in the Global Economy: Reconfigurations of Personal dan Economic Life* Brighton: Institute of Development Studies.
17. CIA (2011) Field listing: sex ratio. *The World Factbook*. Available from: <https://http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2018.html>.

Lampiran 1. Tabel Data Tambahan

1. Jumlah laki-laki dan perempuan serta rasio jenis kelamin spesifik usia, desil 1-3 (BDT) dan laki-laki dan perempuan individual di populasi umum (Sensus Penduduk 2010)

Kelompok Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Desil 1-3*		Seluruh Populasi**	
		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin (L:P)	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin (L:P)
0-9	Laki-laki	7.711.036	108	23.636.463	106
	Perempuan	7.160.833		22.295.719	
	Total	14.871.869		45.932.182	
10-19	Laki-laki	8.065.542	110	22.276.723	105
	Perempuan	7.336.953		21.275.092	
	Total	15.402.495		43.551.815	
20-29	Laki-laki	5.836.658	105	20.519.024	99
	Perempuan	5.568.301		20.683.052	
	Total	11.404.959		41.202.076	
30-39	Laki-laki	5.631.247	96	19.286.874	101
	Perempuan	5.872.003		19.048.942	
	Total	11.503.250		38.335.816	
40-49	Laki-laki	4.664.883	101	15.355.452	101
	Perempuan	4.627.885		15.210.382	
	Total	9.292.768		30.565.834	
50-59	Laki-laki	3.109.143	102	10.266.313	105
	Perempuan	3.056.761		9.743.578	
	Total	6.165.904		20.009.891	
60-69	Laki-laki	1.800.118	87	5.152.324	92
	Perempuan	2.057.526		5.600.468	
	Total	3.857.644		10.752.792	
70-79	Laki-laki	1.001.023	80	2.373.803	78
	Perempuan	1.257.027		3.060.433	
	Total	2.258.050		5.434.236	
80+	Laki-laki	317.007	77	763.937	70
	Perempuan	413.221		1.092.747	
	Total	730.228		1.856.684	
All	Laki-laki	38.136.657	102	119.630.913	101
	Perempuan	37.350.510		118.010.413	
	Total	75.487.167		237.641.326	

* Sumber: BDT

** Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 2010

2. Rasio jenis kelamin komparatif berdasarkan usia regional [17]

	Brunei	China	India	Indonesia	Malaysia	Vietnam	Dunia
Pada saat lahir:	1,05	1,13	1,12	1,05	1,07	1,12	1,07
Di bawah 15 tahun:	1,06	1,17	1,13	1,04	1,06	1,1	1,07
15-64 tahun:	0,97	1,06	1,07	1,01	1,03	1	1,02
65 tahun atau lebih:	0,95	0,92	0,9	0,78	0,89	0,62	0,79
Total populasi (Est. 2011):	1	1,06	1,08	1	1,03	1	1,01

3. Rasio jenis kelamin berdasarkan provinsi dan kelompok usia desil 1-3(BDT) dan laki-laki serta perempuan individual di populasi umum (Sensus Penduduk 2010)

Kelompok Usia	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80+	Total desil 1-3	Total populasi
Desil 1-3	108	110	105	96	101	102	87	80	77	102	
Total Sensus Penduduk 2010	106	105	99	101	101	105	92	78	70	101	
Aceh	107	105	99	88	103	109	88	71	69	100	100
Sumatera Utara	108	107	103	96	99	96	75	68	63	101	100
Sumatera Barat	108	109	104	89	102	107	87	67	54	102	98
Riau	107	109	101	98	112	109	90	83	80	105	106
Jambi	108	110	99	97	107	103	86	83	82	103	105
Sumatera Selatan	107	111	107	99	108	112	92	83	80	106	104
Bengkulu	107	109	100	102	112	111	93	90	83	105	105
Lampung	108	110	104	104	111	114	93	95	116	107	106
Keep. Bangka Belitung	106	110	116	101	105	93	71	66	62	102	108
Kepulauan Riau	108	110	97	94	125	114	99	94	90	106	106
DKI Jakarta	108	109	122	90	100	101	85	79	68	104	103
Jawa Barat	108	112	115	95	103	106	92	83	82	105	104
Jawa Tengah	107	109	108	97	96	97	85	83	85	101	99
DI Yogyakarta	105	108	104	97	95	94	78	78	71	96	98
Jawa Timur	107	110	103	95	95	95	83	71	66	97	98
Banten	109	112	114	95	104	115	101	87	81	107	105
Bali	105	104	99	99	106	96	89	91	89	100	102
Nusa Tenggara Barat	107	106	85	85	90	97	89	89	81	95	94
Nusa Tenggara Timur	107	109	87	87	101	107	98	95	88	101	99
Kalimantan Barat	106	109	111	101	108	107	98	95	89	107	105
Kalimantan Tengah	106	114	105	99	111	111	103	105	100	107	109
Kalimantan Selatan	108	115	111	92	95	93	74	63	54	100	103
Kalimantan Timur	108	113	118	102	107	115	108	107	108	110	111
Sulawesi Utara	108	111	110	107	116	115	101	80	63	109	104
Sulawesi Tengah	106	108	97	106	115	114	103	99	95	106	105
Sulawesi Selatan	107	107	95	96	95	90	78	70	65	98	95
Sulawesi Tenggara	107	108	94	100	108	103	91	88	77	103	101
Gorontalo	106	107	103	105	108	107	98	85	70	105	101
Sulawesi Barat	107	106	90	97	107	102	95	82	77	101	101
Maluku	109	110	97	96	102	108	111	102	90	105	102
Maluku Utara	109	110	99	98	111	113	106	100	97	106	105
Papua Barat	109	108	99	108	109	115	127	133	156	108	112
Papua	115	121	87	97	130	150	147	140	118	111	113

Gambar +/- 10 yang membandingkan dengan rasio untuk rasio desil 1-3 nasional diberi arsir biru.

4. Rasio ketergantungan rata-rata, anak, dan usia (BDT)

Daerah	Rasio Ketergantungan Rata-Rata (usia <15 dan >=65) / usia 15-64			Rasio Ketergantungan Anak (usia <15 dan >=65) / usia 15-64			Rasio Ketergantungan Usia (usia >=65 / usia 15-64)		
	RTP	RTL	Total	RTP	RTL	Total	RTP	RTL	Total
Total: Desil 1-3	61%	59%	59%	37%	51%	49%	24%	8%	10%
Aceh	50%	66%	63%	36%	61%	57%	14%	5%	6%
Sumatera Utara	58%	76%	74%	41%	71%	67%	17%	5%	7%
Sumatera Barat	69%	74%	73%	49%	67%	65%	20%	7%	8%
Riau	52%	68%	66%	39%	64%	61%	13%	4%	5%
Jambi	60%	62%	62%	41%	56%	54%	19%	6%	8%
Sumatera Selatan	53%	61%	60%	38%	55%	53%	15%	6%	7%
Bengkulu	61%	63%	62%	42%	56%	55%	19%	6%	7%
Lampung	56%	60%	59%	36%	52%	51%	20%	8%	8%
Kep. Bangka Belitung	66%	69%	69%	37%	60%	57%	29%	9%	12%
Kepulauan Riau	52%	68%	67%	39%	64%	62%	14%	4%	5%
DKI Jakarta	42%	54%	52%	32%	50%	47%	10%	4%	5%
Jawa Barat	63%	57%	57%	36%	49%	48%	26%	8%	10%
Jawa Tengah	63%	54%	55%	32%	42%	41%	30%	12%	14%
DI Yogyakarta	76%	56%	58%	29%	38%	37%	47%	18%	21%
Jawa Timur	61%	48%	49%	28%	36%	35%	33%	11%	14%
Banten	53%	55%	55%	37%	50%	49%	15%	5%	6%
Bali	62%	62%	62%	34%	49%	49%	27%	12%	13%
Nusa Tenggara Barat	78%	61%	63%	63%	54%	56%	15%	7%	8%
Nusa Tenggara Timur	88%	89%	89%	75%	81%	81%	13%	8%	8%
Kalimantan Barat	52%	62%	61%	39%	57%	55%	13%	6%	6%
Kalimantan Tengah	60%	65%	64%	41%	59%	57%	19%	6%	7%
Kalimantan Selatan	59%	61%	61%	36%	54%	51%	23%	7%	10%
Kalimantan Timur	50%	60%	59%	35%	54%	52%	14%	6%	7%
Sulawesi Utara	61%	60%	60%	40%	53%	52%	21%	7%	8%
Sulawesi Tengah	62%	72%	72%	47%	67%	66%	15%	5%	6%
Sulawesi Selatan	63%	70%	69%	43%	62%	59%	20%	8%	10%
Sulawesi Tenggara	78%	79%	79%	64%	73%	72%	14%	6%	7%
Gorontalo	58%	62%	62%	42%	57%	56%	16%	5%	6%
Sulawesi Barat	72%	85%	84%	56%	79%	77%	16%	6%	7%
Maluku	71%	83%	82%	60%	76%	75%	12%	7%	7%
Maluku Utara	62%	75%	74%	51%	71%	69%	11%	5%	5%
Papua Barat	50%	64%	63%	44%	61%	59%	6%	3%	3%
Papua	61%	62%	62%	56%	60%	60%	4%	1%	1%

* Dua rasio ketergantungan tertinggi dan terendah diarsir:

terendah

tertinggi

5. Status pekerjaan kepala RTP dan RTL berdasarkan provinsi desil 1-3 (BDT) dan populasi (Susenas)

Provinsi	Kepala RTP						Kepala RTL											
	Jumlah Total			Bekerja			Tidak bekerja			Jumlah Total			Bekerja			Tidak bekerja		
	Total desil 1-3	Total Susenas	Desil 1-3	Populasi	Desil 1-3	Populasi	Desil 1-3	Populasi	Desil 1-3	Total desil 1-3	Total Susenas	Desil 1-3	Populasi	Desil 1-3	Populasi	Desil 1-3	Populasi	
																		Saat survei sementara tidak bekerja
Aceh	79.723	211.928	61%	57%	8%	3%	32%	41%	308.686	895.777	89%	92%	5%	2%	5%	6%		
Sumatera Utara	145.643	462.117	63%	67%	3%	3%	34%	30%	695.815	2.621.852	91%	92%	2%	2%	7%	6%		
Sumatera Barat	46.339	193.359	64%	54%	4%	4%	32%	42%	249.185	979.828	92%	89%	2%	3%	6%	8%		
Riau	34.071	132.386	60%	61%	3%	3%	37%	36%	223.531	1.249.167	92%	93%	2%	2%	5%	5%		
Jambi	27.938	90.018	60%	58%	4%	4%	35%	39%	157.976	705.300	92%	92%	2%	3%	6%	5%		
Sumatera Selatan	49.769	181.355	69%	67%	4%	2%	27%	30%	436.510	1.665.657	89%	92%	4%	2%	7%	6%		
Bengkulu	14.773	48.267	72%	65%	5%	4%	24%	31%	117.459	387.210	94%	92%	2%	3%	4%	5%		
Lampung	65.111	195.846	60%	56%	7%	4%	33%	40%	585.407	1.747.950	90%	92%	5%	3%	6%	6%		
Kep. Bangka Belitung	10.562	38.605	41%	52%	1%	4%	58%	44%	35.763	287.938	87%	91%	1%	3%	11%	6%		
Kepulauan Riau	7.957	68.318	42%	74%	4%	1%	54%	26%	64.543	416.882	86%	93%	4%	2%	10%	5%		
DKI Jakarta	53.171	418.226	40%	53%	1%	3%	59%	43%	218.957	2.106.980	80%	89%	1%	1%	19%	10%		
Jawa Barat	503.193	1.501.399	39%	51%	8%	2%	53%	46%	2.816.010	10.259.666	82%	90%	7%	2%	12%	8%		
Jawa Tengah	476.938	1.351.800	56%	60%	5%	3%	39%	37%	2.633.928	7.503.164	86%	89%	4%	3%	10%	8%		
DI Yogyakarta	57.860	197.716	62%	51%	5%	3%	33%	46%	303.280	844.253	88%	84%	4%	3%	8%	13%		
Jawa Timur	700.160	1.788.561	58%	61%	6%	3%	36%	36%	2.909.204	8.767.520	87%	91%	4%	2%	9%	8%		
Banten	87.066	322.237	37%	56%	8%	2%	55%	42%	542.965	2.346.412	79%	91%	9%	2%	13%	7%		
Bali	10.623	104.495	69%	67%	3%	3%	28%	30%	183.965	955.087	92%	91%	2%	3%	6%	7%		
Nusa Tenggara Barat	104.961	276.965	57%	63%	7%	4%	35%	33%	405.659	984.869	82%	89%	7%	4%	10%	7%		
Nusa Tenggara Timur	53.648	175.932	81%	75%	10%	4%	9%	21%	396.024	862.979	92%	91%	6%	3%	3%	6%		
Kalimantan Barat	31.286	127.348	66%	71%	4%	3%	30%	26%	226.863	931.368	90%	93%	3%	2%	7%	5%		
Kalimantan Tengah	10.937	58.712	58%	72%	9%	1%	34%	27%	81.429	540.804	89%	95%	6%	1%	5%	4%		
Kalimantan Selatan	43.280	148.614	53%	61%	10%	4%	36%	35%	139.091	865.384	83%	91%	8%	3%	9%	6%		
Kalimantan Timur	22.265	84.473	40%	53%	7%	3%	53%	44%	146.689	845.650	83%	92%	6%	2%	10%	6%		
Sulawesi Utara	13.112	72.601	45%	51%	5%	1%	50%	47%	161.078	530.962	88%	88%	5%	3%	7%	9%		
Sulawesi Tengah	20.732	67.638	58%	61%	7%	7%	35%	32%	201.877	567.132	92%	91%	3%	5%	5%	5%		
Sulawesi Selatan	97.417	336.396	41%	50%	8%	3%	51%	47%	442.967	1.556.536	83%	87%	8%	4%	9%	9%		
Sulawesi Tenggara	23.754	76.729	72%	66%	8%	5%	20%	29%	152.493	442.049	92%	91%	5%	4%	4%	5%		
Gorontalo	8.173	29.617	59%	57%	9%	4%	32%	38%	91.612	225.703	88%	89%	7%	5%	4%	6%		

Provinsi	Kepala RTP						Kepala RTL																			
	Jumlah Total			Bekerja			Saat survei sementara tidak bekerja			Tidak bekerja			Jumlah Total			Bekerja			Saat survei sementara tidak bekerja			Tidak bekerja				
	Total desil 1-3	Total Susenas	Desil 1-3	Populasi	Desil 1-3	Populasi	Desil 1-3	Populasi	Desil 1-3	Populasi	Total desil 1-3	Total Susenas	Desil 1-3	Populasi	Desil 1-3	Populasi	Total desil 1-3	Total Susenas	Desil 1-3	Populasi	Desil 1-3	Populasi	Total desil 1-3	Total Susenas	Desil 1-3	Populasi
	10.909	38.765	72%	66%	5%	6%	23%	27%	5%	6%	72.972	231.115	94%	90%	3%	5%	72.972	231.115	94%	90%	3%	5%	72.972	231.115	94%	90%
Sulawesi Barat	10.478	46.465	72%	58%	7%	5%	22%	7%	5%	118.664	290.426	91%	89%	5%	4%	118.664	290.426	91%	89%	5%	4%	118.664	290.426	91%	89%	
Maluku Utara	9.490	20.571	70%	74%	4%	1%	26%	4%	1%	83.377	164.641	91%	92%	4%	3%	83.377	164.641	91%	92%	4%	3%	83.377	164.641	91%	92%	
Papua Barat	27.896	61.972	82%	86%	3%	1%	15%	3%	1%	418.256	695.005	95%	97%	1%	1%	418.256	695.005	95%	97%	1%	1%	418.256	695.005	95%	97%	
Total	2.864.364	8.951.823	54%	59%	6%	3%	40%	38%	38%	15.678.15	53.678.98	87%	90%	0	0	15.678.15	53.678.98	87%	90%	0	0	15.678.15	53.678.98	87%	90%	

* Dua skor persentase tertinggi dan terendah diarsir:

terendah

tertinggi

